



RENCANA KERJA TAHUN 2021



GERMAS

Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat

PEMERINTAH KOTA CIMAHI

DINAS KESEHATAN

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wata'ala atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Rencana Kerja Tahun 2021 Dinas Kesehatan Kota Cimahi dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Tahun 2021 disusun dengan mempertimbangkan hasil capaian indikator kinerja yang digunakan, permasalahan yang dihadapi, serta usulan dari masyarakat pada saat Musrenbang. Rencana Kerja Tahun 2021 juga pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2017-2022.

Dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Ucapan termakasih dan penghargaan kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama berbagai pihak dalam penyusunan rencana kerja tahun 2021 ini.

Cimahi, Oktober 2020

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA CIMAHI,**



drg. Hj. Pratiwi, M.Kes

NIP. 19620619 198901 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM.....	3
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	5
D. SISTEMATIKA PENULISAN.....	6
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAHT TAHUN 2019	7
A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2019 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	7
B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	33
C. ISU STRATEGIS.....	37
D. TELAAH TERHADAP USUSLAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT 41	
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	45
PERANGKAT DAERAH.....	45
A. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	45
B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH	47
C. PROGRAN DAN KEGIATAN	49
BAB IV.....	63
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	63
BAB V	79
PENUTUP	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2019..... 7

Tabel 2 Pagu Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2019 berdasarkan Sumber Anggaran 8

Tabel 3 Pagu Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2019 berdasarkan Program..... 9

Tabel 4 Pagu Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2019 berdasarkan Sumber Anggaran 9

Tabel 5 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018..... 11

Tabel 6 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019..... 24

Tabel 7 Indikator Kinerja Utama tahun 2019..... 33

Tabel 8 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2017-2019 34

Tabel 9 Capaian SPM Bidang KesehatanTahun 2018-2019 35

Tabel 10 Capaian Indikator SDGs terkait Bidang Kesehatan Tahun 2018-2019..... 36

Tabel 11 Usulan Musrenbang Bidang Kesehatan Tahun 2020..... 41

Tabel 12 . Sinkronisasi usulan Musrenbang Kecamatan dengan Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2020 42

Tabel 13 Tujuan dan Sasaran DInas Kesehatan Tahun 2021 49

Tabel 14 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra 50

Tabel 15 rumusan rencana program dan Kegiatan tahun 2021 serta perkiraan maju tahun 2022. 52

Tabel 16 Pagu Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2021 berdasarkan Sumber Anggaran. 63

Tabel 17 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 sesuai RKPD 64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Kota Cimahi Tahun 2015-2019
..... 37

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengacu pada Renstra-SKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD). Secara substansi, Renja S KPD memuat evaluasi Renja SKPD tahun sebelumnya, analisis terhadap evaluasi dan rancangan prioritas pembangunan kesehatan, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun oleh berbagai pemangku kepentingan lainnya sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Cimahi tahun 2021 merupakan salah satu dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, kelompok sasaran disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Dinas Kesehatan disusun mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cimahi dan merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam sistem perencanaan daerah, rencana kerja SKPD mempunyai fungsi penting karena merupakan perencanaan pada

unit organisasi terkecil di pemerintahan daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di tingkat yang lebih tinggi. Penyusunan Renja SKPD dilaksanakan melalui 4 (empat) pendekatan, yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antara usulan tingkat kelurahan dan kecamatan, kegiatan yang disusun di tingkat Dinas serta kajian di tingkat Kota, dan juga mengakomodir usulan dari para pemangku kepentingan lainnya baik itu yang diusulkan melalui APBD Kota, usulan ke Provinsi maupun ke tingkat pusat.

Selain itu, perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistiktematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur / bagian / kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilakukan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Penyusunan dokumen rancangan Renja 2021 ini, mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa Renja SKPD disusun dengan tahapan yaitu: persiapan penyusunan Renja, penyusunan rancangan awal Renja, penyusunan rancangan Renja, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir Renja dan penetapan Renja.

Imbas pandemi COVID-19 membuat pemerintah pusat, provinsi dan daerah berupaya akan lebih focus pada penanganan dan penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan 2021 ini memperhatikan berbagai kebijakan dan peraturan yang harus diakomodir oleh pemerintah baik di tingkat provinsi maupun pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota dalam penanggulangan wabah. Disamping mengacu pada keputusan

kementerian dalam negeri berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Dengan adanya dokumen Renja Dinas Kesehatan tahun 2021 ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mencapai tujuan untuk mengembalikan kepada kondisi yang lebih baik dari tahun 2020, sehingga tujuan pembangunan kesehatan dapat tetap tercapai sesuai dengan rencana.

B. DASAR HUKUM

Landasan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2021 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya adalah :

1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
16. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 207);
18. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 228);
19. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 325);
20. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022;
21. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 546 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2021).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Menjabarkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2017-2022 dalam rencana program dan kegiatan tahun 2021.

2. Tujuan

- a. Melakukan analisis kinerja pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2019 terhadap indikator

kinerja yang ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- b. Mengakomodir berbagai kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan proses pembangunan bidang kesehatan di Kota Cimahi khususnya dan pembangunan kesehatan di Indonesia.
- c. Memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Kesehatan sehingga pencapaian target tahunan RENSTRA dan RPJMD dapat dipastikan.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Cimahi tahun 2021 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
- C. Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan
- D. Telaah Terhadap Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN

- A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- B. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN

- A. Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAHT TAHUN 2019

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2019

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2019 ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengukur sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program serta kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program serta kegiatan dalam renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan di tahun 2019. Pada tahun 2019 Dinas Kesehatan Kota Cimahi mengelola Anggaran dari berbagai sumber antara lain anggaran yang bersumber dari APBD Kota Cimahi, APBD Provinsi dan APBN dengan total anggaran sebesar Rp. 100.077.384.326,- yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp. 64.507.494.326,- (64.46%) dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 35.569.890.000,- (35.54%). Adapun rincian lengkap untuk anggaran tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1 Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2019

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN (Rp)
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	35.569.890.000,-
2	BELANJA LANGSUNG	64.507.494.326,-
	Belanja Program (Bidang)	60.177.679.326,-
	Belanja Pendukung (Sekretariat)	4.329.815.000,-
	TOTAL	100.077.384.326,-

Anggaran Belanja Langsung digunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) Bidang, Sekretariat dan 13 (tiga belas) Puskesmas selama tahun 2019. Sumber anggaran berasal dari APBN (DAK Fisik dan DAK Non Fisik) APBD Provinsi (40% Premi iuran PBI Daerah integrasi dengan JKN) dan APBD Kota Cimahi serta Dana Kapitasi JKN bagi 13 Puskesmas. Adapun untuk rincian pagu anggaran Dinas Kesehatan tahun 2019 berdasarkan sumber anggaran ada pada tabel berikut :

Tabel 2 Pagu Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2019 berdasarkan Sumber Anggaran

NO	SUMBER ANGGARAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	%
1	APBN	14.883.634.000,-	23.07
	a. DAK FISIK	5.555.169.000,-	
	b. DAK NON FISIK	9.328.465.000,-	
2	APBD PROVINSI	3.941.649.500,-	6.11
3	APBD KOTA	20.881.989.978,-	32.37
4	KAPITASI JKN	20.240.184.848,-	31.38
5	DBHCHT	4.560.027.000,-	7.07
	TOTAL	64.507.494.326,-	100

Berdasarkan tabel tersebut prosentase sumber anggaran terbesar berasal dari anggaran APBD Kota Cimahi (32.37 %), anggaran kapitasi JKN di Puskesmas (31.38 %). Sementara itu anggaran yang berasal dari APBD Provinsi sebesar 6.11%. Sumber anggaran yang berasal dari pusat /APBN pada tahun 2019 yang dikelola oleh Dinas Kesehatan sebesar 23.07 %.

Anggaran sebagaimana tersebut di atas digunakan untuk mendukung operasional pelaksanaan program di bidang dan sekretariat. Pada tahun 2019 jumlah program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan sebanyak 7 program yaitu 4 program di Bidang dengan 47 kegiatan dan 3 program dengan 21 kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat sehingga jumlah seluruh kegiatan adalah sebanyak 68 kegiatan dan 7 program. Adapun jumlah besaran anggaran di bidang sebanyak Rp. 60.177.679.326,- dan di sekretariat sebesar Rp. 4.329.815.000,-. Berikut tabel anggaran Dinas Kesehatan berdasarkan program yang dikelola pada tahun 2019.

Tabel 3 Pagu Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2019 berdasarkan Program

NO	KODE	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
BIDANG			60.177.679.326,-
1	21	Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Perorangan	12.159.560.725,-
2	37	Program Pengembangan Pembiayaan Kesehatan	35.896.357.548,-
3	38	Program Peningkatan Kualitas Penyediaan Pelayanan Kesehatan	11.032.761.053,-
4	39	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1.089.000.000,-
SEKRETARIAT (PENDUKUNG)			4.329.815.000,-
5	39	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	4.013.461.000,-
6	42	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	216.354.000,-
7	43	Program peningkatan kapasitas aparatur sipil negara	100.000.000,-
TOTAL (BIDANG+SEKRETARIAT)			64.507.494.326,-

Anggaran Belanja Langsung tahun 2019 sebesar Rp. 64.507.494.326,-, realisasi terhadap program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan sebesar Rp. 48.649.917.495,- atau 75,42 % naik 20.07% dari tahun 2018 (55,35%). Adapun rincian realisasi anggaran per program dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4 Pagu Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2019 berdasarkan Sumber Anggaran

NO	KODE	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
				RP	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG			35.569.890.000,-	35.167.127.701,-	98,87
BELANJA LANGSUNG			64.507.494.326,-	48.649.917.495,-	
1	37	Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Perorangan	12.159.560.725,-	9.935.834.559,-	81,71
2	38	Program Pengembangan Pembiayaan Kesehatan	35.896.357.548,-	27.562.615.265	76,78
3	39	Program Peningkatan Kualitas Penyediaan Pelayanan Kesehatan	11.032.761.053,-	6.976.226.227,-	63,23

NO	KODE	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
				RP	%
4	21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat (Anggaran Bantuan Provinsi)	1.089.000.000,-	653.105.000,-	59,97
5	39	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	4.013.461.000,-	3.280.773.444,-	81,74
6	42	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	216.354.000,-	153.863.000,-	71,12
7	43	Program peningkatan kapasitas aparatur sipil Negara	100.000.000,-	87.500.000,-	87,50
		TOTAL	100.077.384.326,-	83.817.045.196,-	83,75

Berdasarkan tabel terlihat bahwa tahun 2019 realisasi anggaran dinas mencapai 83,75 % dengan jumlah realisasi sebesar Rp. 83.817.045.196,- dan realisasi capaian kinerja sebesar 78,51%. Realisasi kinerja secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2018)	Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi Tahun 2018)
1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Pemenuhan kebutuhan obat, reagen, bahan habis pakai di 13 puskesmas	100	95,82	95,82
		Persentase puskesmas terakreditasi minimal dengan strata Madya	61,54	61,54	100,00
	Pengadaan Obat dan perbekalan kesehatan		100	95,82	95,82
		Tersedianya obat di 13 Puskesmas	100	96,46	96,46
		Reagen dan bahan habis pakai tersedia di 13 puskesmas	100	95,18	95,18
		Persentase obat pelayanan kesehatan dasar (sesuai Fornas) yang telah diajukan oleh puskesmas	100	96,46	96,46
		Persentase reagen dan bahan habis pakai yang diajukan oleh puskesmas	100	100,00	100,00
2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	-Penurunan Angka Kematian Ibu - Penurunan Angka Kematian Bayi	102 23	101.8 4.17	
		Persentase peningkatan kategori keluarga sehat	NA	NA	NA
		Prevalensi stunting pada baduta	< 12.04	7,06	147,34
	Perbaikan gizi masyarakat		17,60	21,04	119,52
		Persentase siswa remaja putri yang mendapatkan Tablet Tambah Darah(TTD)	32,8	38,92	119
		Persentase jumlah penerima makanan tambahan (baduta)	40	21,97	54,92
		Persentase rematri mendapat Tablet Tambah darah (TTD)	32,8	38,92	119

		Persentase Ibu hamil KEK	2,4	3,15	131
	Revitalisasi Sistem Kesehatan		75,5	40,63	53,82
		Pelaksanaan koordinasi program JKN dengan lintas sektor	100	75,00	
		Peningkatan kapasitas petugas kesehatan di 13 puskesmas	100	60,00	
		Cakupan asuhan keperawatan keluarga yang dilayani sesuai standar	81	25,67	31,69
		Cakupan kunjungan masyarakat ke fasyankes	70	55,59	79,42
	Pelayanan Kefarmasian dan Alat kesehatan		100	100,00	100,00
		Alat kesehatan tersedia di 13 puskesmas	100	100,00	100,00
		Pembinaan dan pengawasan terhadap penanggungjawab sarana kefarmasian di apotek, toko obat, klinik rumah sakit	1	1,00	100,00
		Persentase pemenuhan kebutuhan alat kesehatan	100	100,00	100,00
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat		100	94,50	94,50
		Kunjungan ibu hamil keempat kali telah mendapatkan pelayanan sesuai standar kebidanan (K4)	100,00	94,66	94,66
		- Kunjungan neonatus (bayi baru lahir umur 0 - 28 hari)	100,00	94,42	94,42
		Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil	100	92,80	92,80
		Cakupan Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100	96,24	96,24
		Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	94,46	94,46
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan		100	29,93	29,93

		Puskesmas menjalankan deteksi dini Ca cervic dan Ca payudara pada wanita usia subur (30 - 50 tahun)	100	100,00	100,00
		Peningkatan puskesmas dalam pelaksanaan pelayanan PTM terpadu (KIA, Promkes, Gizi , UKS, kesehatan kerja)	100	100,00	100,00
		Cakupan Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	100	22,63	22,63
		Cakupan Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	100	37,39	37,39
		Cakupan Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Mellitus	100	29,76	29,76
	Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan		46,00	80,06	174,03
		Akses KK terhadap air minum yang berkualitas	82	87,51	106,72
		Jumlah RW yang belum ODF (kelurahan Cipageran)	10	-	-
		Persentase akses penduduk terhadap air minum berkualitas	82	87,51	106,7
		Persentase akses penduduk terhadap jamban sehat	70,75	72,60	102,6
	Kegiatan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)		100,00	100,00	100,00
		Dokter kecil	10	10,00	100
		Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (kelas 1 dan kelas 7) oleh Puskesmas	100	100,00	100
		Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	100,00	100
	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas dan Jaringannya	Kontak rate per bulan	-	-	
	Jaminan Kesehatan Nasional Kota Cimahi		100	95,90	95,90
		Persentase pembiayaan kesehatan bagi PBI JKN Kota Cimahi (60 % dari premi)	100	97,20	97,20

		Persentase pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di luar kuota PBI (Jamkesda)	100	99,86	99,86
		Persentase pembiayaan kesehatan bagi PBI JKN Kota Cimahi (60 % dari premi)	100	97,20	97,20
		Persentase pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di luar kuota PBI (Jamkesda)	100	99,86	99,86
	Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) di luar kuota jamkesmas		25.000	15.927,00	63,71
		Terjaminnya perlindungan kesehatan bagi PBI JKN Kota Cimahi sebesar 40% dari premi yang harus dibayarkan	25.000	15.927	63,71
		Persentase pembiayaan kesehatan bagi PBI JKN Kota Cimahi (40 % dari premi)	100	99,33	99,33
	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Cimahi Utara	Terlayannya peserta JKN yang memerlukan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Cimahi Utara	100	49,52	49,52
		Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Cimahi Utara	100	49,52	49,52
	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Pasirkaliki	Terlayannya peserta JKN yang memerlukan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Pasirkaliki	100	16,97	16,97
		Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Pasirkaliki	100	16,97	16,97
	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Citeureup	Terlayannya peserta JKN yang memerlukan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Citeureup	100	53,88	53,88
		Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Citeureup	100	53,88	53,88
	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Cipageran	Terlayannya peserta JKN yang memerlukan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Cipageran	100	45,42	45,42
		Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Cipageran	100	45,42	45,42

	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Cimahi Tengah	Terlayannya peserta JKN yang memerlukan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Cimahi Tengah	100	49,02	49,02
		Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Cimahi Tengah	100	49,02	49,02
	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Padasuka	Terlayannya peserta JKN yang memerlukan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Padasuka	100	22,01	22,01
		Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Padasuka	100	22,01	22,01
	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Cigugur Tengah	Terlayannya peserta JKN yang memerlukan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Cigugur Tengah	100	54,42	54,42
		Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Cigugur Tengah	100	54,42	54,42
	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Cimahi Selatan	Terlayannya peserta JKN yang memerlukan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Cimahi Selatan	100	47,21	47,21
		Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Cimahi Selatan	100	47,21	47,21
	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Melong Asih	Terlayannya peserta JKN yang memerlukan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Melong Asih	100	31,73	31,73
		Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Melong Asih	100	31,73	31,73
	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Cibeureum	Terlayannya peserta JKN yang memerlukan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Cibeureum	100	31,22	31,22
		Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Cibeureum	100	31,22	31,22
	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Leuwigajah	Terlayannya peserta JKN yang memerlukan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Leuwigajah	100	64,90	64,90

		Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Leuwigajah	100	64,90	64,90
	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Cibeber	Terlayannya peserta JKN yang memerlukan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Cibeber	100	48,90	48,90
		Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Cibeber	100	48,90	48,90
	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Melong Tengah	Terlayannya peserta JKN yang memerlukan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Melong Tengah	100	22,76	22,76
		Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Melong Tengah	100	22,76	22,76
	Bantuan Operasional Kesehatan		100	60,05	60,05
		Terlaksananya dukungan manajemen BOK yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan	100	60,05	
		Jumlah indikator SPM dengan cakupan > 80%	7	5,00	71,43
	Jaminan Persalinan	Terjaminnya ibu bersalin yang tidak memiliki jaminan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan	10	25,31	253,13
		Persentase pembiayaan persalinan bersumber dana Jampersal (di luar peserta JKN)	100	62,96	62,96
	Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat		100	79,88	79,88
		Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100	100,00	100,00
		Penemuan dan penanganan kasus jiwa baru di puskesmas	100	94,13	94,13
		Cakupan Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	100,00	79,88	79,88
	Penyelenggaraan dan Pembinaan Kesehatan Kerja dan Olah Raga		89,00	94,85	106,57
		Jumlah Pos UKK di wilayah kerja puskesmas	3,00	3,00	100,00
		Jumlah Pos UKK yang terbentuk	6	6,00	100,00
		Persentase jemaah haji yang diperiksa kebugarannya	78,00	94,55	121,21

3	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Pangan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) yang memenuhi persyaratan	65,00	77,00	118,46
		Persentase peningkatan kategori keluarga sehat	NA	NA	NA
		Prevalensi stunting pada baduta	< 12.04	7,06	58,64
	Peningkatan pemberdayaan konsumen / masyarakat di bidang obat dan makanan		51,00	51,00	100,00
		Penyuluhan keamanan pangan bagi Industri Rumah Tangga	2	2,00	100,00
		Audit Sarana Produksi IRTP	100	100,00	100,00
		Persentase peserta Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) yang lulus dan mendapatkan sertifikat	100	96,67	96,67
		Persentase sarana IRTP yang diaudit	100	100,00	100,00
	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya		40,00	40,00	100,00
		Pembinaan dan pengawasan kantin/warung sekolah (PJAS) (unit)	40	40,00	100,00
		Pembinaan dan pengawasan sarana kefarmasian di Apotek, Toko Obat, Klinik, Rumah Sakit (unit)	40	40,00	100,00
		Jumlah kantin/warung sekolah (PJAS) yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	41	41,00	100,00
4	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Jumlah RW percontohan yang aktif memanfaatkan TOGA	100	100,00	100
		Persentase peningkatan kategori keluarga sehat		NA	NA
		Prevalensi stunting pada baduta		7,06	58,64
	Peningkatan Promosi Obat Bahan Alam Asli Indonesia di dalam dan di luar negeri	Pembinaan RW Percontohan dengan pemanfaatan TOGA	15	15,00	100
		Jumlah RW percontohan baru	15,00	15,00	100
		Jumlah RW percontohan baru yang mendapatkan pembinaan dan memanfaatkan TOGA	15,00	15,00	100

5	Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat	Cakupan desa/RW siaga aktif	100,00	100,00	100,00
		Persentase peningkatan kategori keluarga sehat	NA	NA	NA
		Prevalensi stunting pada baduta	<12,04	7,06	58,64
	Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat		47,50	44,00	92,63
		Pembinaan dan evaluasi Kota Sehat	100,00	100,00	100
		Cakupan Rumah Tangga ber-PHBS	55,00	49,86	90,65
		Cakupan strata RW Siaga Aktif purnama dan mandiri	40	38,14	95,35
	Pengembangan KIE dampak asap rokok		5	8,12	162,47
		Cakupan indikator tidak merokok dalam PHBS Institusi Pendidikan	73	49,51	68
		Cakupan indikator tidak merokok dalam PHBS rumah tangga	53	68,83	130
		Cakupan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di fasyankes	5	7,57	151
		Cakupan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di perkantoran	5	8,68	174
6	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	100,00	88,32	88,32
		Persentase peningkatan kategori keluarga sehat		NA	NA
		Prevalensi stunting pada baduta		7,06	58,64
	Kegiatan Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100,00	111,42	111,42
	Kegiatan Pencegahan Penularan Penyakit Endemik Dan Epidemik	Foging sesuai dengan indikasi (memenuhi persyaratan penyelidikan epidemiologi)	100	75,6	75,61
		Angka Bebas Jentik (ABJ)	≥95%	91,9	96,74
	Kegiatan Peningkatan Imunisasi	Imunisasi Dasar Lengkap	80	93,59	116,99
		Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	93	93,59	100,64

	Kegiatan Peningkatan Surveillance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah	Kelurahan yang mengalami KLB < 24 jam	100	100,00	100,00
		Penemuan Kasus AFP pada penduduk < 15 tahun	$\geq 2/100000$	3,00	150,00
	Kegiatan Penanggulangan HIV-AIDS	Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	100	60,98	60,98
7	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	IKM dalam bidang pelayanan kesehatan	78,10	78,74	100,81
		Persentase puskesmas terakreditasi minimal dengan strata Madya	61,54	61,54	100,00
	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan		3,00	3,00	100,00
		Akreditasi Puskesmas	3,00	3,00	100,00
		Puskesmas BLUD	3,00	-	
		Jumlah Puskesmas dengan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) yang meningkat stratanya	2,00	2,00	100,00
	Pengembangan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan		100	100	100,00
		Pelaporan sistem pencatatan pelaporan puskesmas (SP3) menggunakan software	100	100,00	100,00
		Pemanfaatan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) di 13 puskesmas	100	-	-
		Persentase puskesmas yang melaporkan data kesehatan secara lengkap dan tepat waktu	80	76,92	96,15
	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	Jumlah pendidikan dan pelatihan bagi SDM kesehatan	4	1,00	25,00
		Jumlah dokumen data dan informasi SDM kesehatan yang dihasilkan	2	-	
		Persentase nakes yang terlatih	100	NA	
8	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	100	100,00	100,00
		Persentase peningkatan kategori keluarga sehat		NA	NA
		Prevalensi stunting pada baduta		7,06	58,64
	Kegiatan Sunatan Massal	Terlaksananya kegiatan sunatan masal bagi masyarakat di Kota Cimahi	75	75,00	100,00

		Jumlah anak dari keluarga miskin yang dikhitan	75	75,00	100,00
9	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya	Terpenuhinya sarana dan prasarana puskesmas atau puskesmas pembantu sesuai kebutuhan	100	41,67	41,67
		Persentase puskesmas terakreditasi minimal dengan strata Madya		61,54	
	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas		4,00	5,50	137,5
		Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan di 13 puskesmas	100,00	100,00	100,00
		Perbaikan gedung puskesmas	5,00	7,00	140,00
		Jumlah puskesmas atau pustu yang mendapatkan pengadaan perbaikan prasarana (Puskemas Rawat inap)	5,00	8,00	160,00
		Jumlah pengadaan sarana kendaraan operasional (ambulans dan motor) di puskesmas	3,00	3,00	100,00
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kesehatan	Terpeliharanya alat kesehatan di 13 puskesmas	100	100,00	100
10	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan santun lansia	100	100,00	100,00
		Persentase peningkatan kategori keluarga sehat		NA	NA
		Prevalensi stunting pada baduta		7,06	58,64
	Kegiatan Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan	Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia lanjut usia	100	13,45	13,45
		Persentase pengunjung berusia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	13,45	13,45
11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien	100	87,41	87,41
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselesaikannya 5000 surat masuk dan 5000 surat keluar	100	75,90	75,90
	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarkannya jasa penggunaan telepon, listrik, air di dinas kesehatan, puskesmas, gudang farmasi dan gudang vaksin dan internet di dinas kesehatan	100	57,09	57,09

		Jumlah bulan jasa komunikasi	12	12,00	100,00
		Jumlah bulan jasa listrik	12	12,00	100,00
		Jumlah bulan jasa air	12	12,00	100,00
	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penyediaan jasa jaminan asuransi untuk kendaraan roda 2 dan 4 di dinas kesehatan dan puskesmas	100	78,74	78,74
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan di dinas kesehatan	100	74,18	74,18
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih dan terbayarkannya jasa petugas kebersihan	100	92,87	92,87
		Jumlah bulan jasa kebersihan kantor	12	12,00	100,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor sebagai penunjang kegiatan di dinas kesehatan	100	93,56	93,56
		Jumlah bulan penyediaan ATK	12	12,00	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan spanduk, cetakan, penggandaan di dinas dan puskesmas	100	67,75	67,75
		Jumlah bulan penyediaan media informasi	12	12,00	100,00
		Jumlah bulan penggandaan	12	12,00	100,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik di dinas kesehatan dan puskesmas	100	84,77	84,77
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar dan peraturan perundang-undangan di dinas kesehatan	100	77,80	77,80
		Jumlah bulan penyediaan media informasi	100	12,00	100,00
		Jumlah bulan penggandaan	100	12,00	100,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman sebagai penunjang kegiatan	100	84,63	84,63
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	100	12,00	100,00
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Tersedianya pengadaan fasilitas koordinasi dan konsultasi dalam perjalanan dinas	100	98,14	98,14
		Jumlah perjalanan dinas	949	949,00	100,00
		Jumlah perjalanan caraka	9	9,00	100,00

	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dan rumah dinas	Tersedianya jasa pengamanan di puskesmas, gudang vaksin dan gudang farmasi	100	91,50	91,50
12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhi dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur dinas kesehatan dan puskesmas	100	91,61	91,61
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	100	100,00	100,00
		Jumlah pengadaan kendaraan	15	15,00	100
	Pengadaan Meubeleur	Tersedianya kebutuhan Meubeleur di dinas kesehatan	100	98,85	98,85
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur di dinas kesehatan dan puskesmas	100	79,35	79,35
	Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor	Tersedianya pemeliharaan puskesmas, gudang farmasi dan gudang vaksin	100	99,95	99,95
		Jumlah bulan pemeliharaan	12	3,00	25,00
	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	100	87,68	87,68
		Jumlah kendaraan yang dipelihara	108	12,00	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	100	45,45	45,45
	Penyediaan gudang	Terlaksananya kegiatan penyewaan gedung/kantor untuk pendukung kegiatan puskesmas	100	100,00	100,00
13	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				
	kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	Terlaksananya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu			
14	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100	100	100,00
	Pendidikan dan Pelatihan formal	Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan formal	100	-	
	Pembinaan Pegawai	Terlaksananya kegiatan pembinaan pegawai	100	100,00	100,00
15	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	71,23	71,23

	Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan khtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang dihasilkan	4	3,00	75,00
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Terlaksananya kegiatan penyusunan pelaporan keuangan semesteran Dinas Kesehatan			
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya kegiatan penyusunan pelaporan keuangan tahunan Dinas Kesehatan	100	67,45	67,45
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi capaian kinerja program dan kegiatan per triwulan	100	66,66	66,66
	Pengendalian pengelolaan Keuangan dan Aset	Terlaksananya kegiatan pengendalian pengelolaan keuangan dan aset	100	97,91	97,91

Tabel 6 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target renstra PD pada tahun 2019 - 2020 (akhir periode renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Proghram dan Kegiatan Tahun 2020	Target Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2020	
				Target Renja 2019	Realisasi Renja 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Perorangan	Persentase peningkatan kategori keluarga sehat	5	3	3,12	104	5	5	100
		Prevalensi stunting pada baduta	< 12,04	12,04	6,98	143,71	12,04	12,04	100
	Pelayanan Kesehatan ibu dan anak	Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil	100	100	95,09	95,09	100	100	100
		Cakupan Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100	100	97,31	97,31	100	100	100
		Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	100	94,95	94,95	100	100	100
	Penanggulangan masalah gizi masyarakat	Persentase rematri mendapat Tablet Tambah darah (TTD)	35	33	62,24	188,61	35	35	100
		Persentase Ibu hamil KEK	2,38	2,39	3,53	51,6	2,38	2,38	100
	Pelayanan Kesehatan anak usia sekolah	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	100	69,94	69,94	100	100	100
	Pelayanan sunatan massal	Jumlah anak dari keluarga miskin yang dikhitan	150	75	75	100	75	75	100
	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Cakupan Rumah Tangga ber-PHBS	65	60	50,93	84,89	65	65	100

		Cakupan strata RW Siaga Aktif purnama dan mandiri	60	50	31,73	63,46	60	60	100
	Peningkatan KIE dampak asap rokok	Cakupan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di fasyankes	9	7	18,14	259,12	9	9	100
		Cakupan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di perkantoran	9	7	7,85	112,16	9	9	100
	Peningkatan Promosi obat bahan alami asli Indonesia didalam dan diluar negeri	Jumlah RW percontohan baru yang mendapatkan pembinaan dan memanfaatkan TOGA	30	15	-	-	15	15	100
	Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan	Persentase peserta Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) yang lulus dan mendapatkan sertifikat	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase sarana IRTP yang diaudit	100	100	100	100	100	100	100
	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	Jumlah kantin/warung sekolah (PJAS) yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	44	42	23	54,76	44	44	100
		Jumlah sarana pelayanan kefarmasian yang mendapat pembinaan dan pengawasan	44	42	42	100	44	44	100
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan masyarakat	Cakupan asuhan keperawatan keluarga yang dilayani sesuai standar	83	82	82,21	100,26	83	83	100
		Cakupan kunjungan masyarakat ke fasyankes	80	75	36,92	49,23	80	80	100
	Pengkajian Pengembangan lingkungan sehat	Persentase akses penduduk terhadap air minum berkualitas	84	83	95,83	115,46	84	84	100
		Persentase akses penduduk terhadap jamban sehat	71,5	71	79,9	112,54	71,5	71,5	100
	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	Persentase rumah sehat	66	65	68	104,62	66	66	100
	Pelayanan pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular	Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100	100	135,23	135,23	100	100	100

		Cakupan Pelayanan kesehatan orang terduga TB			64,64		100	100	100
	Pencegahan Penularan Penyakit Endemik & Epidemik	Angka Bebas Jentik (ABJ)	≥95%	≥95	89,05	93,73	≥95	≥95	100
	Penanggulangan HIV AIDS	Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100	100	69,02	69,02	100	100	100
	Peningkatan Pelayanan Imunisasi	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	93	93	93,61	100,65	93	93	100
	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	100	100	90,08	90,08	100	100	100
		Cakupan Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	100	100	72,96	72,96	100	100	100
		Cakupan Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Mellitus	100	100	98,36	98,36	100	100	100
	Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat	Cakupan Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	100	100	114,32	114,32	100	100	100
	Penyelenggaraan dan pembinaan kesehatan kerja dan Olah raga	Jumlah Pos UKK yang terbentuk	10	8	11	137,5	10	10	100
		Persentase jemaah haji yang diperiksa kebugarannya	85	80	94,55	118,18	85	85	100
	Peningkatan kesehatan lansia	Persentase pengunjung berusia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	70,26	70,26	100	100	100
	Peningkatan Surveilans Epidemiologi Penanggulangan Wabah	Penemuan Kasus AFP pada penduduk < 15 tahun	≥ 2/100000	≥ 2/100000	4	200	≥ 2/100000	≥ 2/100000	100
	Bantuan Operasional Kesehatan	Jumlah indikator SPM dengan cakupan > 80%	10	9	6	66,67	10	10	100
	Pencegahan dan intervensi stunting	Jumlah baduta kurus gakin yang mendapat PMT lokal	36	36	36	100			

		Jumlah ibu hamil KEK yang mendapat PMT lokal		15	15	100			
2	Program Pengembangan Pembiayaan Kesehatan	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan nasional	92	90	91,7	101,89	91,7	91,7	100
	Pembiayaan Kesehatan Kota Cimahi	Persentase pembiayaan kesehatan bagi PBI JKN Kota Cimahi (60 % dari premi)	100	100	85,35	85,35	100	100	100
		Persentase pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di luar kuota PBI (Jamkesda)	100	100	99,97	99,97	100	100	100
	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cimahi Utara	Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Cimahi Utara	100	100	16,86	16,86	100	100	100
	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Pasirkaliki	Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Pasirkaliki	100	100	77,57	77,57	100	100	100
	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Citeureup	Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Citeureup	100	100	53,33	53,33	100	100	100
	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cipageran	Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Cipageran	100	100	14,21	14,21	100	100	100
	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cimahi Tengah	Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Cimahi Tengah	100	100	24,65	24,65	100	100	100
	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Padasuka	Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Padasuka	100	100	19,32	19,32	100	100	100

	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cigugur Tengah	Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Cigugur Tengah	100	100	29,21	29,21	100	100	100
	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cimahi Selatan	Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Cimahi Selatan	100	100	42,19	42,19	100	100	100
	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Melong Asih	Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Melong Asih	100	100	32,09	32,09	100	100	100
	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cibeureum	Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Cibeureum	100	100	25,78	25,78	100	100	100
	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cibeber	Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Cibeber	100	100	43,82	43,82	100	100	100
	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Leuwigajah	Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Leuwigajah	100	100	80,96	80,96	100	100	100
	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Melong Tengah	Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Melong Tengah	100	100	33,21	33,21	100	100	100
	Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di puskesmas dan jaringannya	Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	100	20	14,27	71,33			
	Jaminan Persalinan	Persentase pembiayaan persalinan bersumber dana Jampersal (di luar peserta JKN)	100	100	87,39	87,39	100	100	100
3	Program Peningkatan Kualitas Penyediaan Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas terakreditasi minimal dengan strata Madya	84,62	92,31	92,31	100	84,62	84,62	100
	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Jumlah Puskesmas dengan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) yang meningkat stratanya	5	2	2	100	3	3	100

	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase nakes yang terlatih	100	100	83,33	83,33	1	1	100
	Akreditasi Puskesmas	Jumlah puskesmas yang ter-Akreditasi	3	3	3	100	0	0	100
		Jumlah Puskesmas re-akreditasi	7	3	3	100	4	4	100
	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Persentase obat pelayanan kesehatan dasar (sesuai Fornas) yang telah diajukan oleh puskesmas	100	100	87,5	87,5	100	100	100
		Persentase reagen dan bahan habis pakai yang diajukan oleh puskesmas	100	100	100	100	100	100	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	Jumlah puskesmas atau pustu yang mendapatkan pengadaan perbaikan prasarana (Puskemas Rawat inap)	10	7	1	14,29	4	4	100
		Jumlah pengadaan sarana kendaraan operasional (ambulans dan motor) di puskesmas	4		-		4	4	100
	Pengadaan alat kesehatan dan pelayanan kefarmasian	Persentase pemenuhan kebutuhan alat kesehatan	100	100	100	100	100	100	100
	Pengembangan dan pemutakhiran Data dasar Standar Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas yang melaporkan data kesehatan secara lengkap dan tepat waktu	90	85	84,62	99,55	90	90	100
4	Program Pengembangan Lingkungan Sehat (Anggaran Banprov Tahun 2019)			100	73	73,33			
	Pengadaan prasarana/alat kesehatan	Jumlah alat kesehatan yang tersedia (sanitarian kit)		14	10	71,43			
		Jumlah alat kesehatan yang tersedia (autoclave)		1	1	100			
5	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara	100	100	96	96,43	100	100	100

		Persentase koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100	100
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan ATK	12	12	11	91,67	12	12	100
	Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air	Jumlah bulan jasa komunikasi	12	12	12	100	12	12	100
		Jumlah bulan jasa listrik	12	12	12	100	12	12	100
		Jumlah bulan jasa air	12	12	12	100	12	12	100
	Penyediaan media massa, barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan media informasi	12	12	12	100	12	12	100
		Jumlah bulan penggandaan	12	12	12	100	12	12	100
	Pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas	Jumlah pengadaan kendaraan	4	0	-	-	4	4	100
		Jumlah kendaraan yang dipelihara	112	108	108	100	27	27	100
		Jumlah kendaraan asuransi yang dibayar	64	108	108	100	27	27	100
	Pengadaan dan pemeliharaan meubelair kantor	Jumlah meja	10	2	1	50	8	8	100
		Jumlah kursi	10	2	-	-	8	8	100
		Jumlah lemari	1	1	2	200	4	4	100
		Jumlah set partisi	2	2	-	-	0	0	100
	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah unit komputer	13	7	4	57,14	5	5	100
		Jumlah unit printer	6	3	1	33,33	3	3	100
		Jumlah unit server	1	0	-	-	1	1	100
		Jumlah unit ac	2	3	3	100	2	2	100
	Penyediaan gudang kantor	Jumlah gudang	1	1	-	-	3	3	100
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah set peralatan rumah tangga	3	3	3	100	2	2	100

	Penataan arsip daerah	Jumlah arsip aktif dan inaktif	4	2	2	100	12	12	100
	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan dan ketenagakerjaan	Jumlah bulan THL yang diasuransikan	12	12	12	100	12	12	100
	Pengadaan seragam pegawai	Jumlah set seragam pegawai	370	0			12	12	100
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12	12	12	100	725	725	100
	Koordinasi dan konsultasi kedinasan	Jumlah perjalanan dinas	650	600	599	99,83	80	80	100
		Jumlah perjalanan caraka	70	65	5	7,69	12	12	100
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan jasa kebersihan kantor	12	12	12	100			100
	Pemeliharaan rumah dan gedung dinas	Jumlah bulan pemeliharaan	12	12	12	100	12	12	100
6	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LAKIP	79	75	64,2	85,6	79(BB)	79(BB)	100
		Persentase capaian penyerapan anggaran	85	85	79,56	93,6	85	85	100
	Penyusunan anggaran perangkat daerah	Jumlah dokumen anggaran	2	2	2	100			100
	Penyusunan Laporan Inventaris Barang	Jumlah dokumen Laporan Inventaris Barang	1	1	1	100	1	1	100
	Penyusunan standar pelayanan operasional dan prosedur Perangkat Daerah	Jumlah SOP	2	2	2	100	1	1	100
	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen Laporan Keuangan	1	1	1	100			100
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RENSTRA	1	0	-	-	1	1	100
		Jumlah dokumen RENJA	2	2	2	100	2	2	100

B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pengukuran pencapaian sasaran pembangunan kesehatan diukur dengan menggunakan indikator-indikator pembangunan kesehatan mulai dari Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan (IKU) hingga indikator tujuan Indeks Kesehatan. Pengukuran target kinerja dari tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Adapun hasil pencapaian untuk indikator Indeks Kesehatan tahun 2019 adalah sebesar 82,91. Sementara itu untuk pengukuran kinerja dari sasaran strategi akan diukur berdasarkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan yang terdiri dari Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Indeks Keluarga Sehat. Berikut tabel hasil pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan di tahun 2019 yang mencakup indikator Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Indeks Keluarga Sehat.

Tabel 7 Indikator Kinerja Utama tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	PERHITUNGAN	% REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	101,5 /100.000 KH	$\frac{13}{10.810} \times 100.000 =$	120.26	81.52
		Angka Kematian Bayi (AKB)	7.10 / 1000 KH	$\frac{63}{10.810} \times 1000 =$	5.83	82.11
		Indekss Keluarga Sehat	0.32	$\frac{28470}{130.104} = 0.22$	0.22	68.75

Hasil Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2019 untuk indikator Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 120,26 /100.000 KH atau ditemukan kasus kematian pada ibu sebanyak 13 kasus dari 10.810 kelahiran hidup, terdapat peningkatan yang signifikan. Hasil ini berada jauh diatas target yang telah ditetapkan 101,5/100.000 KH. Sementara itu untuk hasil capaian Angka Kematian Bayi (AKB) adalah sebesar 5,83/1.000 KH atau ditemukan sebanyak 63 kasus

kematian bayi, hasil ini masih dibawah target 7,10 / 1.000 KH. Kemudian untuk hasil capaian indikator ketiga dalam IKU dinas kesehatan adalah Indeks Keluarga Sehat dengan hasil capaian tahun 2019 sebesar 0.22, masih dibawah target 0,32.

Tabel 8 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2017-2019

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target			Capaian			% Capaian		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	102	102	101,5	113.98	102.16	120.26	88.25	99.84	81.52
2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH	23	7.12	7.10	7.14	4.18	5.83	173.17	141.29	82.11
3	Indekss Keluarga Sehat	-	0.40	0.32	-	0.29	0.22	-	90.63	68.75

Hasil capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) dari 3 (tiga) indikator kinerja sasaran Dinas Kesehatan pada tahun 2019 yang mengacu pada skala nilai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 menunjukkan hasil capaian kinerja **“tinggi”** ($76\% \leq 90\%$) untuk 2 indikator AKI dan AKB sedangkan untuk indikator Indeks Keluarga Sehat menunjukan hasil capaian kinerja **“Sedang”** ($66\% \leq 75\%$). Ketiga Indikator ini mengalami penurunan persentase capaian bila dibandingkan dengan persentase capaian untuk IKU yang sama pada tahun 2017 dan 2018.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2019 telah dilaksanakan pada tahun 2019, yang menggantikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2016. Terdapat perbedaan mengenai definisi operasional pada beberapa indikator SPM antara Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 4 Tahun 2019 dengan Permenkes Nomor 43 Tahun 2016, seperti pada indikator Pelayanan Kesehatan pada balita, Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar, Pelayanan Kesehatan orang terduga TB, sehingga akan tampak adanya penurunan terhadap hasil capaian indikator SPM.

Tabel 9 Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2018-2019

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TARGET (%)	CAPAIAN 2018	CAPAIAN 2019
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100	94.66	95.09
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100	96.24	97.31
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	94.42	94.95
4	Pelayanan kesehatan balita	100	48.39	53.93
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	100.00	69.94
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	90.27	90.08
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100	58.78	70.26
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100	65.65	72.96
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100	96.80	98.36
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100	79.88	114.32
11	Pelayanan kesehatan orang terduga TB	100	49.71	74.06
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HumanImmunodeficiencyVirus)	100	60.98	69.02

Pembangunan bidang kesehatan di Indonesia khususnya di Kota Cimahi tidak terlepas dari komitmen global untuk turut serta dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan Indek Pembangunan Manusia (IPM) dan derajat kesehatan manusia Indonesia. Komitmen global bersama saat ini merupakan upaya melanjutkan program Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Hasil pelaksanaan SDGs di Indonesia selama tahun 2019 terjadi peningkatan untuk angka kematian ibu dan angka kematian bayi, semula untuk Angka Kematian Ibu (AKI) di tahun 2018 sebesar 102,16 per 100.000 KH meningkat menjadi 120,26 per 100.000 KH, sedangkan untuk Angka Kematian Bayi (AKB) semula 4,18 per 1000 KH menjadi 5, 83 per 1000 KH. Berikut hasil pencapaian 5 (lima) tujuan SDGs dalam bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan oleh dinas kesehatan Kota Cimahi tahun 2018-2019.

Tabel 10 Capaian Indikator SDGs terkait Bidang Kesehatan Tahun 2018-2019

NO	INDIKATOR	TARGET		CAPAIAN	
		2018	2019	2018	2019
1	Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan (%)	100	100	100%	100%
2	Prevalensi gizi buruk	≤ 1	≤ 1	0.08	0,07
3	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada bayi usia 6-24 bln dari keluarga miskin	100	100	27.64%	17,64%
4	Angka Kematian Bayi	7.12/100 0 KH	7,10/1000 KH	4.6/100 0 KH	5,83/1000 KH
5	Angka Kematian Balita	26/1000 KH	26/1000 KH	0.11/10 00 KH	6,1 /1000 KH
6	Angka Kematian Ibu	102/100. 000 KH	101,5/100. 000 KH	102/100 .000 KH	120,26/100 .000 KH
7	Cakupan neonatus dengan komplikasi ditangani	82	83	40.93 %	43,50 %
8	Cakupan kunjungan Neonatal	98	100	94.8%	94,7 %
9	Cakupan kunjungan bayi	95	93	91.7	94,8
10	Cakupan pelayanan anak balita	85	100	60.7	80,4
11	Prevalensi HIV/AIDS; Jumlah kasus baru; Kasus kumulatif (2005-2019)	< 0.5	< 0.5	0,096 52 402	- 79 481
12	% penduduk terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan ARV	65 %	65 %	64,36 % (233 dari 362)	
13	Angka kematian akibat HIV yang dilaporkan (CFR)	-	-	40 orang	37 orang
14	Angka kejadian tuberkolosis (semua kasus/100.000 penduduk/tahun)	-	-	394/100 .000	482/100.00 0
15	Tingkat kematian karena tuberkolosis (per 100.000 penduduk)	-	-	9/100.0 0 0	11/100.000

Pelaksanaan program SDGs sejalan dengan pelaksanaan program SPM bidang kesehatan yang ditetapkan oleh kementerian kesehatan. Saat ini pemerintah daerah telah melaksanakan SPM bidang kesehatan yang mengacu pada Permenkes Nomor 4 tahun 2019. Implementasi pelaksanaan SPM yang dilaksanakan oleh puskesmas. Puskesmas merupakan ujung tombak yang langsung terlibat dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat.

C. ISU STRATEGIS

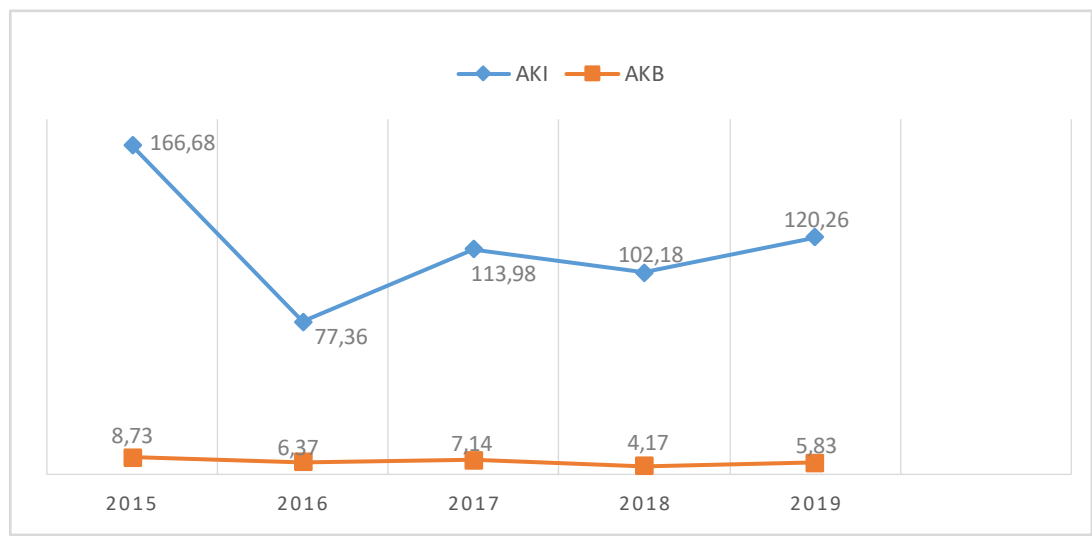
Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan tidak terlepas dari berbagai isu penting baik di tingkat nasional maupun regional (provinsi) terutama berkaitan dengan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkaitan dengan bidang kesehatan, Kementerian Kesehatan menjalankan 5 (lima) program strategis yaitu : peningkatan kesehatan ibu, anak, dan kesehatan reproduksi; percepatan perbaikan gizi masyarakat; peningkatan pengendalian penyakit; pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS); dan peningkatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.

Berikut uraian mengenai berbagai isu yang berkaitan dengan program di Dinas Kesehatan.

1. Masih Adanya Kematian Ibu dan Bayi

Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi merupakan salah satu indikator derajat kesehatan. Tren Angka Kematian Ibu maupun Angka Kematian Bayi selama beberapa tahun terakhir masih fluktuatif.



Gambar 1 Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Kota Cimahi Tahun 2015-2019

Angka Kematian Ibu di Kota Cimahi tahun 2019 sebesar 120,26/100.000 KH meningkat dibanding tahun 2018 sebesar yaitu 102,18/100.000 KH. Peningkatan kasus kematian ibu di kota

Cimahi tahun 2019 umumnya disebabkan karena faktor internal dari ibu hamil. Beberapa penyebab kematian ibu yang terjadi saat ini antara lain karena kasus perdarahan (3 kasus), penyakit jantung (2 kasus), Eklamsi (1 kasus), infeksi appendiks perforasi (1 kasus), Anemi kongenital (1 kasus), PEB (2 kasus) dan penyebab lain-lain seperti TB (2 kasus) dan DM (1 kasus). Secara nasional penyebab kematian ibu terutama masih disebabkan oleh perdarahan (27,1%), Hipertensi (22,1%) dan penyebab lain-lain (30,2%).

Sementara itu Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Cimahi pada tahun 2019 sebesar 5.83 per 1000 KH atau sebanyak 63 kasus kematian bayi. Hasil capaian Angka Kematian Bayi (AKB) ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 4.18 per 1000 KH

AKI dan AKB perlu mendapat perhatian khusus dan harus diselesaikan agar target RPJMD pada akhir periode dapat tercapai, karena berdasarkan target RPJMD untuk AKI adalah 99/100.000 KH dan AKB 6,8/1000 KH.

2. Belum Tercapainya Target SPM Bidang Kesehatan

Capaian SPM masing masing setiap indikator jenis layanan adalah sebagai berikut: Pelayanan kesehatan ibu hamil 95,09%, Pelayanan kesehatan ibu bersalin 97,31%, Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 94,95%, Pelayanan kesehatan balita 53,93%, Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 71,25%, Pelayanan kesehatan pada usia produktif 90,08%, Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 70,26%, Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 60,48%, Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus 98,36%, Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 114,32%, Pelayanan kesehatan orang terduga TB 64,64%, Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) 69,02%.

SPM Bidang Kesehehatan perlu mendapat perhatian khusus. Pencapaian target-target SPM menjadi indikator penilaian kinerja Kepala Daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada Warga Negara. Karena itu perlu upaya yang lebih optimal dan terkoordinasi agar pencapaian tersebut sesuai target.

3. Stunting Pada Balita

Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sehingga, anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Penyebab dari *stunting* adalah rendahnya asupan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan, yakni sejak janin hingga bayi umur dua tahun. Selain itu, buruknya fasilitas sanitasi, minimnya akses air bersih, dan kurangnya kebersihan lingkungan juga menjadi penyebab *stunting*. Kondisi kebersihan yang kurang terjaga membuat tubuh harus secara ekstra melawan sumber penyakit sehingga menghambat penyerapan gizi.

Angka Stunting pada balita di Kota Cimahi tahun 2019 sebesar 9.06%, masih dibawah capaian provinsi Jawa Barat sebesar 29,9% (BKKBN, 2019) dan hasil capaian nasional 30,8 % (Riskesdas 2018). Dan capaian ini juga masih dibawah target nasional 28 % di 2019 (RPJMN, 2019). Meski demikian stunting tetap menjadi perhatian karena Stunting yang telah terjadi bila tidak ditangani dengan baik dapat mengakibatkan menurunnya pertumbuhan, lemahnya Kognitif dan psikomotorik terhambat, lebih mudah terkena penyakit degeneratif, dan rendah kualitas sumber daya manusia.

4. Meningkatnya Kasus Penyakit Menular Dan Tidak Menular.

Upaya pengendalian penyakit menular difokuskan pada penurunan prevalensi kasus penyakit HIV-AIDS, Tuberkulosis dan Demam Berdarah Dengue (DBD). Jumlah kasus Tuberkulosis dengan BTA terkonfirmasi positif mengalami pada tahun 2019 sebanyak 482 kasus. Kasus DBD pada tahun 2019 sebanyak 1020 kasus

Jumlah kasus DM pada tahun 2019 sebanyak 7604 kasus, sedangkan untuk kasus Hipertensi sebanyak 20.600 kasus. Pola hidup yang tidak sehat meningkatkan faktor risiko meningkatnya penyakit tidak menular (PTM). Keadaan ini perlu segera ditindaklanjuti mengingat dampak yang ditimbulkannya serta dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

5. Belum Optimalnya Pembiayaan Kesehatan

Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan Perpres Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Jaminan Kesehatan, Pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan mulai diwujudkan sejak 1 Januari 2014. Yaitu sejak diberlakukannya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dalam bidang kesehatan atau sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Diharapkan pada tahun 2019 seluruh rakyat Indonesia sudah menjadi peserta JKN (*Universal Health Coverage*).

Capaian kepesertaan JKN Kota Cimahi sampai dengan akhir 2019 sebanyak 506.047 Jiwa (91.70%) dari seluruh penduduk Kota Cimahi. Capaian ini masih di bawah target yang telah ditetapkan yaitu 92%. Selain itu secara Nasional pada tahun 2019 target kepesertaan adalah 100% dengan kata lain seluruh rakyat Indonesia sudah menjadi peserta JKN (*Universal Helth Coverage*).

Pencapaian UHC di Kota Cimahi perlu menjadi prioritas. Perlu meningkatkan kesadaran masyarakat agar secara mandiri menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Selain itu ketersediaan data masyarakat kurang mampu yang valid sangat diperlukan dalam rangka perhitungan peserta PBI (penerima bantuan iuran) yang preminya dibayar Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

6. Pandemi COVID-19

Kondisi Pandemi COVID-19 sejak Maret 2020, menyebabkan perubahan diberbagai aspek kehidupan, terutama sangat berpengaruh pada aspek kesehatan masyarakat. Sehingga, pelaksanaan program-program bidang kesehatan terfokus pada penanganan COVID-19. Pada tahun 2020 Jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 di Kota Cimahi sebanyak 2095 kasus, pasien sembuh 1428 kasus, Orang Tanpa Gejala 12.169 kasus, jumlah kematian 57 kasus.

Penanganan pandemi COVID-19 membutuhkan kemitraan berbagai pihak dan kesiapan sumber daya manusia pendukung. Peran tenaga kesehatan sangat penting dalam penanganan COVID-19 pada setiap *level* intervensi. Perlu melakukan komunikasi dan edukasi masyarakat terkait protokol kesehatan untuk melawan Covid-19. Kemudian untuk melakukan *contact tracing* dan *tracking* (penyelidikan

kasus dan investigasi wabah), serta pelaksanaan vaksinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat.

D. TELAAH TERHADAP USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam penyusunan rencana kerja tahun 2021 tidak terlepas dari peran serta masyarakat dan lintas sektor. Melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat RW, Kelurahan, Kecamatan terdapat usulan-usulan kegiatan yang berasal dari masyarakat dan lintas sektor yang merupakan salah satu bentuk konsultasi publik.

Perencanaan yang bersifat bottom up ini akan mengkomodir usulan-usulan yang selanjutnya akan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan di dinas kesehatan. Berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2020 tingkat Kecamatan se-Kota Cimahi untuk perencanaan kegiatan tahun 2020, didapatkan beberapa usulan masyarakat di bidang kesehatan.

Tabel 11 Usulan Musrenbang Bidang Kesehatan Tahun 2020

No	Kegiatan	Lokasi	Alasan
1	Pengkajian Pengembangan lingkungan sehat. - ODF - Keterkaitan lintas sektor : PUPR, Dinas Lingkungan Hidup.	Cimahi	Keterbatasan lahan, Sosial Ekonomi, lahan hibah sulit, pengetahuan dan perilaku masyarakat, daerah bantaran sungai, kontur lahan.
2	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak - Revitalisasi Posyandu - AKI/AKB tinggi - Keterkaitan lintas sektor : DINSOSP2KBP3A.	Cimahi	Pengetahuan kader, sarana dan prasaran posyandu. Sistem rujukan belum optimal, deteksi dini penyulit kehamilan, infeksi penyakit menular pada ibu hamil, optimalisasi RW Siaga.
3	Penyuluhan masyarakat Pola Hidup sehat & Peningkatan KIE dampak asap rokok. - PHBS	Cimahi	Masih terdapat perilaku merokok didalam rumah, jamban sehat masih kurang. Belum optimalnya penerapan Perda KTR
4	Penanggulangan masalah gizi masyarakat. - Stunting - Keterkaitan lintas sektor : Disdikpora, PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, DINSOSP2KBP3A, Kemenag.	Cimahi	Pengetahuan keluarga tentang gizi bagi bayi & balita masih kurang, hygiene & sanitasi kurang baik

5	Program pengembangan pembiayaan kesehatan - UHC belum tercapai - Trend pembiayaan SKTM terus meningkat - Pembiayaan di RS belum efisien. - Keterkaitan lintas sektor : Kelurahan, Kecamatan, DINSOSP2KBP3A	Cimahi	Optimalisasi pelaksanaan verifikasi dan validasi data kepesertaan JKN. Tingginya peserta yang menunggak iuran pada segmen PBPU Perlu ditingkatkannya keikutsertaan segmen PPU dalam program JKN
6	Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat - Indeks keluarga sehat masih rendah	Cimahi	Pendataan dan intervensi hasil pendataan belum optimal.
7	Pelayanan dan pencegahan dan pengendalian penyakit menular. - Pelayanan kesehatan orang dengan terduga TBC	Cimahi	Banyak suspek TB yang ditemukan tetapi tidak sampai ke Puskesmas padahal telah dirujuk. Penderita terkendala dikarenakan beberapa hal, antara lain adanya perubahan sistem program TB dan perubahan regulasi BPJS Kesehatan tentang sistem rujukan.
8	Penanggulangan HIV AIDS. - Meningkatnya Kasus HIV AIDS - Keterkaitan lintas sektor : BNN Kota Cimahi, Disdikpora	Cimahi	Kurangnya pengetahuan tentang HIV AIDS dan meningkatnya perilaku tidak sehat/penyimpangan perilaku, seperti penyalahgunaan narkoba (penasun, obat-obatan)), sex bebas, LGBT.
9	Pencegahan penularan penyakit endemik dan epidemik - DBD selalu ada	Cimahi	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memberantas jentik, pelaksanaan PSN belum optimal.

Tabel 12 . Sinkronisasi usulan Musrenbang Kecamatan dengan Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2020

USULAN MUSYAWARAH KECAMATAN			RENJA DINAS KESEHATAN	
No	Kelompok Usulan	Lokasi	Program	Kegiatan
1	Pelayanan Jamkesmas, Jamkesda, Jampersal dan BPJS	<u>Kec Cimahi Utara :</u> Citeureup dan Pasir Kaliki	Program Pengembangan Pembiayaan KesehatanPembia yaan Kesehatan	Pembiayaan Kesehatan Kota Cimahi
		<u>Kec Cimahi Tengah :</u> Padasuka, Cigugur Tengah dan Cimahi		Jaminan Persalinan
		<u>Kec Cimahi Selatan :</u> Leuwigajah dan Utama		Pelayanan Kesehatan Dasar JKN di Puskesmas se-Kota Cimahi

2	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	<u>Kec Cimahi Utara :</u> Pasir Kaliki dan Citeureup	Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Perorangan	Peningkatan Kesehatan Masyarakat
		<u>Kec Cimahi Tengah :</u> Baros, Setiamanah, Karang Mekar, Padasukadan Cimahi		
		<u>Kec Cimahi Selatan :</u> Cibeureum, Melong, dan Utama		
3	Peningkatan Pelayanan posyandu dan Posbindu	<u>Kec Cimahi Utara:</u> Cipageran dan Pasir Kaliki	Program Upaya Peningkatan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak
		<u>Kec Cimahi Tengah :</u> Padasuka, Cigugur Tengah, Karang Mekar, Cimahi dan Baros		Peningkatan Kesehatan Lansia
		<u>Kec Cimahi Selatan :</u> leuwigajah,Cibeureum, Utama, dan Melong		Penanggulangan Masalah Gizi Masyarakat
				Peningkatan Pelayanan Imunisasi
				Peningkatan Pelayanan Dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
4	Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	<u>Kec Cimahi Utara :</u> Pasir Kaliki dan Cibabat	Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Perorangan	Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
		<u>Kec Cimahi Tengah :</u> Cigugur Tengah, Cimahi, dan Karang Mekar		Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
		<u>Kec Cimahi Selatan :</u> Cibeber , Melong, Leuwigajah,		
5	Pemberian makanan tambahan bagi balita	<u>Kec Cimahi Utara :</u> -	Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Perorangan	Penanggulangan Masalah Gizi Masyarakat Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak
		<u>Kec Cimahi Tengah :</u> Karang Mekar dan Baros		
		<u>Kec Cimahi Selatan :</u> Leuwigajah dan Melong		
6	Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas	<u>Kec Cimahi Utara :</u> Cibabat, dan Citeureup	Program Peningkatan Kualitas Penyediaan Pelayanan Kesehatan	Pengadaaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas
		<u>Kec. Cimahi Tengah :</u> -		
		<u>Kec Cimahi Selatan :</u> Melong		
7	Pembangunan Puskesmas	<u>Kec Cimahi Utara :</u> Pasir Kaliki	Program Peningkatan Kualitas Penyediaan Pelayanan	Pengadaaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas
		<u>Kec. Cimahi Tengah:</u> Baros		

		Kec Cimahi Selatan : -	Kesehatan	
8	Pelayanan Kesehatan Lansia dan pelatihan kader	<u>Kec Cimahi Utara :</u> Pasir Kaliki	Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Perorangan	Peningkatan Kesehatan Lansia
		<u>Kec Cimahi Tengah :</u> Padasuka		Peningkatan Pelayanan Dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
		<u>Kec Cimahi Selatan :</u> Melong, dan Leuwigajah,		
9	Penyuluhan bahaya Narkoba dan HIV AIDS	<u>Kec Cimahi Utara :</u> Citeureup, Cibabat, Pasir Kaliki, dan Cipageran	Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Perorangan	Penanggulangan HIV AIDS
		<u>Kec Cimahi Tengah :</u> Karang Mekar, Cimahi, Baros, Padasuka, Setiamanah		
		<u>Kec Cimahi Selatan :</u> Leuwigajah, Cibeureum dan Utama		
10	Pengadaan Alat Kesehatan Untuk Puskesmas dan Jaringannya	<u>Kec Cimahi Utara :</u> Cipageran	Program Peningkatan Kualitas Penyediaan Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan Dan Pelayanan Kefarmasian
		<u>Kec Cimahi Tengah :</u> Karang Mekar		
		<u>Kec Cimahi Selatan :</u> :-		
11	Peningkatan dan Pengawasan Keamanan Pangan dan bahan Berbahaya	<u>Kec Cimahi Utara :</u>	Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Perorangan	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya
		<u>Kec Cimahi Tengah :</u>		
		<u>Kec Cimahi Selatan :</u> Melong		

Berdasarkan hasil usulan musrenbang di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat di setiap kecamatan sangat mengharapkan adanya peningkatan pelayanan kesehatan terutama yang berkaitan dengan Pelayanan JKN, penambahan kepesertaan, penyuluhan kesehatan serta peningkatan sarana dan prasarana di puskesmas, posyandu maupun posbindu, Peningkatan pengawasan keamanan pangan. Dalam kaitannya dengan penyusunan rencana kerja (Renja) dinas Kesehatan tahun 2021 maka usulan-usulan tersebut kemudian disandingkan dengan program dan kegiatan yang telah tercantum dalam Renstra dinas kesehatan tahun 2017-2022

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

A. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Penyusunan rencana kerja (Renja) Dinas Kesehatan tahun 2021 memasuki tahun keempat dari Renstra Dinas Kesehatan periode 2017-2022. Seperti kita ketahui bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan hal yang sangat penting dalam proses pencapaian visi misi daerah, karena dalam perencanaan tersebut terdapat kegiatan, tahapan, maupun strategi dalam mencapai target akhir pembangunan daerah yang tertuang dalam visi dan misi daerah. Dalam konteks nasional, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan PP No 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan nasional memberikan kriteria bahwa untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan harus sinkron dengan pelaksanaan penganggaran. Penganggaran memiliki peranan penting agar perencanaan dapat terlaksana secara optimal.

Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang penting dan tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan dari pemerintahan itu sendiri yaitu untuk mensejahterakan rakyatnya. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi, oleh karenanya *output* dari perencanaan adalah penganggaran. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Daerah, menjadi landasan implementatif pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan dan penganggaran pembangunan daerah. Dokumen RKPD dan APBD merupakan dokumen perencanaan dan anggaran yang saling berkaitan, sehingga perlu adanya penekanan sinkronisasi antara dokumen APBD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah seperti Renstra perangkat daerah dan Renja perangkat daerah menjadi acuan dalam penyusunan dokumen anggaran daerah seperti KUA, PPAS, rancangan APBD sampai menjadi APBD yang dilaksanakan berbasis elektronik. Penyusunan dokumen perencanaan menggunakan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Proses penyusunan rencana kerja tahunan telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan, mulai dari pelaksanaan musrenbang tingkat kelurahan hingga musrenbang nasional. Pemerintah pusat telah menyiapkan strategi dalam upaya perbaikan akibat wabah pandemic ini. Terdapat dua pilihan strategi yang akan dituangkan dalam penyusunan rencana kerja tahun 2021. Strategi apabila Covid-19 berakhir tahun 2020, maka hal yang harus dilakukan adalah:

1. Melakukan sinkronisasi serta berkontribusi terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN (5 Arah Prioritas Presiden), Rancangan RKP 2021 dan Perda RPJMD yang berlaku dan menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD 2021 serta dengan melakukan program pemulihan pasca COVID-19.
2. Penyusunan RKPD 2021 berpedoman kepada Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
3. Penyusunan RKPD dan APBD menggunakan SIPD dan memperhatikan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan daerah dengan mengacu pada hasil pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mencapai target pembangunan Nasional.

Sedangkan strategi kedua apabila Covid-19 masih berlanjut hingga 2021 maka upaya yang dilakukan adalah:

1. Pemerintah pusat akan melanjutkan dan memprioritaskan program dan kegiatan pada penanganan Covid-19 dengan focus pada kesehatan, dampak ekonomi, penyediaan jaring pengaman social, program-program mendesak lainnya di daerah.
2. Pemerintah daerah perlu memperhatikan, antara lain :
 - a. Melakukan reformulasi target kinerja pemerintah daerah akibat dampak pandemic Covid-19
 - b. Menetapkan sector kesehatan sebagai salah satu focus pembangunan pasca pandemic Covid-19
 - c. Meningkatkan ketahanan pangan
 - d. Menetapkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan lapangan kerja dan bersifat stimulus bagi dunia usaha UMKM dan industri padat karya
 - e. Alokasikan belanja hibah dan bantuan sosial sebagai rangkaian paska pandemi Covid-19 dalam upaya perluasan jaring pengaman social, efisiensi dan efektivitas belanja

B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Dalam penyusunan rencana kerja daerah tahun 2021, Program pembangunan Daerah selaras dengan Lima Program Prioritas Nasional yaitu pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi dan regulasi, serta transformasi ekonomi, sebagai sinkronisasi dan harmonisasi program Pemerintah Pusat dalam upaya menyesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini. Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, diberi kewenangan dalam penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu atau reconfusing perubahan alokasi penggunaan APBD.

Berkaitan dengan program dan kegiatan prioritas yang merupakan target pembangunan dalam RPJMN IV tidak terlepas dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kota Cimahi. Salah satu nya dibidang kesehatan terdapat beberapa program dan kegiatan yang masih merupakan

pekerjaan rumah pemerintah daerah untuk dilanjutkan dalam periode pembangunan selanjutnya. Beberapa upaya yang dilakukan untuk melanjutkan Pembangunan di bidang kesehatan, antara lain untuk :

1. Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
2. Revitalisasi sarana dan prasarana kesehatan
3. Promotif dan Preventif Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
4. Mempercepat Penurunan Stunting
5. Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin

Terdapat beberapa program kegiatan nasional yang merupakan program pembangunan kesehatan untuk tahap selanjutnya, akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah khususnya dinas kesehatan Kota Cimahi. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan wujud dari tugas dan fungsi dinas kesehatan Kota Cimahi untuk mendukung pencapaian Misi Kepala daerah terutama pada misi **pertama**, yaitu **“meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul”** memiliki tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Selama periode 5 tahun, dinas kesehatan memiliki tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui misi dan misi dinas dengan memperhatikan sasaran pokok dan arah kebijakan yang ada dalam RPJMD dan RPJPD kota Cimahi.

Tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan renja tahun 2021 tidak terlepas dari Renstra dinas kesehatan 2017-2022. Dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui indikator kinerja pencapaian Indeks Kesehatan sebesar 82.53. Indeks Kesehatan merupakan bagian dari Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana kualitas pembangunan manusia yang telah berhasil dicapai. Indek kesehatan merupakan indikator untuk menilai kondisi kesehatan masyarakat. Hasil capaian untuk IPM Jawa Barat dan Kota Cimahi tahun 2019 adalah masing-masing sebesar 72.03 dan 78.11, hasil ini berada diatas capaian IPM Nasional yaitu 71.92. Sementara itu untuk sasaran renja perangkat daerah adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui 3 (tiga) indikator kinerja utama AKI,

AKB, dan Indek Keluarga Sehat. Berikut adalah tabel dari tujuan dan sasaran dinas kesehatan tahun 2021:

Tabel 13 Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2021

Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	82,94	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	AKI per 100.000 KH	100
				AKB PER 1000 KH	6,8
				Indeks Keluarga Sehat	0,42

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada penyusunan program dan kegiatan tahun 2021, sejalan dengan telah terbitnya Permendagri nomor 90 tahun 2019 sekaligus mengganti Permendagri nomor 13 tahun 2006, maka program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Perubahan terjadi pada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Permendagri 90 tahun 2019 ini.

Dalam rangka mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran serta memperhatikan kebijakan dan kondisi yang ada maka untuk memperjelas cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut melalui strategi pembangunan kesehatan, kebijakan dan program kerja sebagai berikut :

1. Strategi

Strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan 2017-2022, yaitu 5 (lima) strategi yaitu:

1. Mengembangkan upaya-upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan perorangan
2. Meningkatkan kualitas penyediaan pelayanan kesehatan
3. Meningkatkan cakupan pembiayaan kesehatan
4. Meningkatkan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan
5. Meningkatkan kualitas aparatur

Setiap strategi akan dijabarkan dalam beberapa arah kebijakan. Arah kebijakan yang ditetapkan sebanyak 16 dengan pembagian 13 kebijakan di bidang dan 3 kebijakan di sekretariat.

2. Kebijakan

Arah kebijakan merupakan langkah selanjutnya dalam penyusunan Renstra perangkat daerah setelah penetapan strategi. Urutan strategi dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun mendatang dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan.

Arah kebijakan merupakan pedoman yang mengarahkan pada pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas serta fungsi perangkat daerah yang lebih tepat, fokus dan rasional sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Arah kebijakan membantu untuk memperjelas strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan.

Tabel 14 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Kesehatan 2017 – 2022

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Mengembangkan upaya-upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan perorangan	1. Meningkatkan Pelayanan kesehatan ibu dan Anak di wilayah kerja puskesmas
			2. Pemberian dan pemantauan bantuan makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil kurang gizi
			3. Inovasi Promosi upaya preventif sejak usia dini
			4. Promosi hidup bersih dan sehat bagi masyarakat
			5. Pemantauan kesehatan makanan dan minuman khususnya yang beredar di sekolah-sekolah
			6. Pengembangan pelayanan konsultasi kesehatan secara pro aktif

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			7. Pembinaan dan pemantauan pengelolaan pemukiman bersih (intervensi di perubahan perilaku melalui penyuluhan dan pemicuan)
			8. Identifikasi dan pencegahan penyakit menular
			9. Peningkatan cakupan imunisasi
			10. Optimalisasi program-program kesehatan inklusif
		2. Meningkatkan kualitas penyediaan pelayanan kesehatan	1. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di fasyankes
			2. Pengembangan sistem informasi dan aplikasi pelayanan rujukan
		3. Meningkatkan cakupan pembiayaan kesehatan	Pengembangan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Cimahi
		4. Meningkatkan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan	1. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pemerintahan
			2. Peningkatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan
		5. Meningkatkan kualitas aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur penyelenggaraan pemerintahan

3. Program, Kegiatan

Program, kegiatan di Dinas Kesehatan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 15 rumusan rencana program dan Kegiatan tahun 2021 serta perkiraan maju tahun 2022.

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Maju	Pagu Indikatif Maju
FUNGSI PENUNJANG URUSAN								
PENDUKUNG PEMERINTAHAN								
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA					195.000.000			195.000.000
	(1)Persentase ASN Yang Dibina;		(1)100 Persen;				(1)100 Persen;	
Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Pegawai	(1)Jumlah ASN yang dibina; (2)Jumlah ASN yang terlatih;	Kota Cimahi	(1)0 Orang; (2)0 Orang;	195.000.000	APBD KOTA		(1)0 Orang; (2)0 Orang;	195.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN					413.000.000			413.000.000
	(1)Nilai LAKIP; (2)Persentase Realisasi Anggaran;		(1)85 Indeks; (2)85 Persen;				(1)85 Indeks; (2)85 Persen;	
Penyusunan Anggaran Perangkat Daerah	(1)Jumlah dokumen anggaran;	Kota Cimahi	(1)2 Dokumen;	65.000.000	APBD KOTA		(1)2 Dokumen;	65.000.000
Penyusunan Laporan Inventaris Barang	(1)Jumlah dokumen laporan inventaris barang;	Kota Cimahi	(1)1 Dokumen;	50.000.000			(1)1 Dokumen;	50.000.000
Penyusunan Laporan Keuangan	(1)Jumlah dokumen laporan keuangan;	Kota Cimahi	(1)1 Dokumen;	65.000.000	APBD KOTA		(1)1 Dokumen;	65.000.000

Penyusunan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, Lkip Dan Lppd Pd	(1)Jumlah dokumen LKIP; (2)Jumlah dokumen LPPD; (3)Jumlah dokumen monev;	Kota Cimahi	(1)1 Dokumen; (2)1 Dokumen; (3)4 Dokumen;	173.000.000	APBD KOTA		(1)1 Dokumen; (2)1 Dokumen; (3)4 Dokumen;	173.000.000
Penyusunan Renstra Dan Renja Pd	(1)Jumlah dokumen Renja; (2)Jumlah dokumen Renstra;	Kota Cimahi	(1)2 Dokumen; (2)0 Unit;	50.000.000	APBD KOTA		(1)2 Dokumen; (2)0 Unit;	50.000.000
Penyusunan Standar Pelayanan Operasional Dan Prosedur Pd	(1)Jumlah SOP;	Kota Cimahi	(1)0 Dokumen;	10.000.000	APBD KOTA		(1)0 Dokumen;	10.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				3.832.500.000				3.832.500.000
	(1)Persentase Koordinasi Dan Konsultasi Yang Difasilitasi; (2)Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Dipelihara;		(1)100 Persen; (2)100 Persen;				(1)100 Persen; (2)100 Persen;	
Koordinasi Dan Konsultasi Kedinasan	(1)Jumlah perjalanan caraka; (2)Jumlah perjalanan dinas;	Kota Cimahi	(1)75 Kali; (2)680 Kali;	414.500.000	APBD KOTA		(1)75 Kali; (2)680 Kali;	414.500.000
Pemeliharaan Rumah Dan Gedung Dinas	(1)Jumlah bulan pemeliharaan;	Kota Cimahi	(1)12 Bulan;	490.000.000	APBD KOTA		(1)12 Bulan;	490.000.000
Penataan Arsip Daerah	(1)Jumlah arsip aktif dan inaktif;	Kota Cimahi	(1)2 Dokumen;	25.000.000	APBD KOTA		(1)2 Dokumen;	25.000.000
Pengadaan Dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	(1)Jumlah kendaraan asuransi yang dibayar; (2)Jumlah kendaraan yang di pelihara; (3)Jumlah pengadaan kendaraan;	Kota Cimahi	(1)66 Unit; (2)114 Unit; (3)2 Unit;	1.100.000.000	APBD KOTA		(1)66 Unit; (2)114 Unit; (3)2 Unit;	1.100.000.000

Pengadaan Dan Pemeliharaan Meubeleur Kantor	(1)Jumlah kursi; (2)Jumlah lemari; (3)Jumlah meja; (4)Jumlah set partisi;	Kota Cimahi	(1)5 Unit; (2)0 Unit; (3)5 Unit; (4)1 Set;	100.000.000	APBD KOTA		(1)5 Unit; (2)0 Unit; (3)5 Unit; (4)1 Set;	100.000.000
Pengadaan Dan Pemeliharaan Peralatan Kantor	(1)Jumlah unit AC; (2)Jumlah unit komputer; (3)Jumlah unit printer; (4)Jumlah unit server;	Kota Cimahi	(1)2 Unit; (2)4 Unit; (3)3 Unit; (4)0 Unit;	200.000.000	APBD KOTA		(1)2 Unit; (2)4 Unit; (3)3 Unit; (4)0 Unit;	200.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	(1)Jumlah bulan penyediaan ATK;	Kota Cimahi	(1)12 Bulan;	95.000.000	APBD KOTA		(1)12 Bulan;	95.000.000
Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan Dan Ketenagakerjaan	(1)Jumlah bulan THL yang diasuransikan ;	Kota Cimahi	(1)12 Bulan;	65.000.000	APBD KOTA		(1)12 Bulan;	65.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	(1)Jumlah bulan jasa kebersihan kantor;	Kota Cimahi	(1)12 Bulan;	390.000.000	APBD KOTA		(1)12 Bulan;	390.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik Dan Air	(1)Jumlah bulan jasa air; (2)Jumlah bulan jasa komunikasi; (3)Jumlah bulan jasa listrik;	Kota Cimahi	(1)12 Bulan; (2)12 Bulan; (3)12 Bulan;	750.000.000	APBD KOTA		(1)12 Bulan; (2)12 Bulan; (3)12 Bulan;	750.000.000
Penyediaan Makanan Dan Minuman	(1)Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman;	Kota Cimahi	(1)12 Bulan;	70.000.000	APBD KOTA		(1)12 Bulan;	70.000.000
Penyediaan Media Massa, Barang Cetakan Dan Penggandaan	(1)Jumlah bulan penggandaan; (2)Jumlah bulan penyediaan media informasi;	Kota Cimahi	(1)12 Bulan; (2)12 Bulan;	125.000.000	APBD KOTA		(1)12 Bulan; (2)12 Bulan;	125.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	(1)Jumlah set peralatan rumah tangga;	Kota Cimahi	(1)3 Set;	8.000.000	APBD KOTA		(1)3 Set;	8.000.000

URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR								
KESEHATAN								
PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN KESEHATAN				22.552.640.000				22.552.640.000
	(1)Persentase Masyarakat Yang Memiliki Jaminan Kesehatan Nasional;		(1)95 Persen;				(1)95 Persen;	
Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional Di Puskesmas Cibeber	(1)Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Cibeber ;	Kota Cimahi	(1)100 Persen;	902.808.000	APBD KOTA		(1)100 Persen;	902.808.000
Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional Di Puskesmas Cibeureum	(1)Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Cibeureum ;	Kota Cimahi	(1)100 Persen;	1.657.296.000	APBD KOTA		(1)100 Persen;	1.657.296.000
Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional Di Puskesmas Cigugur Tengah	(1)Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Cigugur Tengah;	Kota Cimahi	(1)100 Persen;	1.696.104.000	APBD KOTA		(1)100 Persen;	1.696.104.000
Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional Di Puskesmas Cimahi Selatan	(1)Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Cimahi Selatan;	Kota Cimahi	(1)100 Persen;	1.564.920.000	APBD KOTA		(1)100 Persen;	1.564.920.000
Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional Di Puskesmas Cimahi Tengah	(1)Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Cimahi Tengah	Kota Cimahi	(1)100 Persen;	1.927.728.000	APBD KOTA		(1)100 Persen;	1.927.728.000

Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional Di Puskesmas Cimahi Utara	(1)Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Cimahi Utara;	Kota Cimahi	(1)100 Persen;	1.838.376.000	APBD KOTA		(1)100 Persen;	1.838.376.000
Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional Di Puskesmas Cipageran	(1)Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Cipageran ;	Kota Cimahi	(1)100 Persen;	1.560.456.000	APBD KOTA		(1)100 Persen;	1.560.456.000
Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional Di Puskesmas Citeureup	(1)Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Citeureup;	Kota Cimahi	(1)100 Persen;	1.244.520.000	APBD KOTA		(1)100 Persen;	1.244.520.000
Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional Di Puskesmas Leuwigajah	(1)Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Leuwigajah ;	Kota Cimahi	(1)100 Persen;	1.004.904.000	APBD KOTA		(1)100 Persen;	1.004.904.000
Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional Di Puskesmas Melong Asih	(1)Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Melong Asih ;	Kota Cimahi	(1)100 Persen;	1.441.800.000	APBD KOTA		(1)100 Persen;	1.441.800.000
Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional Di Puskesmas Melong Tengah	(1)Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Melong Tengah;	Kota Cimahi	(1)100 Persen;	832.176.000	APBD KOTA		(1)100 Persen;	832.176.000
Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional Di Puskesmas Padasuka	(1)Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Padasuka ;	Kota Cimahi	(1)100 Persen;	1.740.168.000	APBD KOTA		(1)100 Persen;	1.740.168.000

Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional Di Puskesmas Pasirkaliki	(1)Persentase Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas Pasirkaliki;	Kota Cimahi	(1)100 Persen;	741.384.000	APBD KOTA		(1)100 Persen;	741.384.000
Pembiayaan Kesehatan Kota Cimahi	(1)Persentase pembiayaan kesehatan bagi PBI JKN Kota Cimahi (60 % dari premi); (2)Persentase pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di luar kuota PBI (Jamkesda);	Kota Cimahi	(1)100 Persen; (2)100 Persen;	4.400.000.000	APBD KOTA		(1)100 Persen; (2)100 Persen;	4.400.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYEDIAAN PELAYANAN KESEHATAN				5.870.000.000				5.870.000.000
	(1)Persentase Puskesmas Terakreditasi Minimal Dengan Strata Madya;		(1)92.31 Persen;				(1)92.31 Persen;	
Akreditasi Puskesmas	(1)Jumlah Puskesmas re-akreditasi; (2)Jumlah puskesmas yang ter-Akreditasi ;	Kota Cimahi	(1)3 PKM; (2)0 PKM;	648.000.000	APBD KOTA		(1)3 PKM; (2)0 PKM;	648.000.000
Evaluasi Dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	(1)Jumlah Puskesmas dengan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) yang meningkat stratanya;	Kota Cimahi	(1)3 Unit;	600.000.000	APBD KOTA		(1)3 Unit;	600.000.000
Pengadaan Alat Kesehatan Dan Pelayanan Kefarmasian	(1)Persentase pemenuhan kebutuhan alat kesehatan ;	Kota Cimahi	(1)100 Persen;	875.000.000	APBD KOTA		(1)100 Persen;	875.000.000

Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan	(1)Persentase obat pelayanan kesehatan dasar (sesuai Fornas) yang telah diajukan oleh puskesmas; (2)Persentase reagen dan bahan habis pakai yang diajukan oleh puskesmas ;	Kota Cimahi	(1)100 Persen; (2)100 Persen;	2.375.000.000	APBD KOTA		(1)100 Persen; (2)100 Persen;	2.375.000.000
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas	(1)Jumlah pengadaan sarana kendaraan operasional (ambulans dan motor) di puskesmas; (2)Jumlah puskesmas atau pustu yang mendapatkan pengadaan perbaikan prasarana (Puskemas Rawat inap);	Kota Cimahi	(1)2 Unit; (2)3 PKM;	452.000.000	APBD KOTA		(1)2 Unit; (2)3 PKM;	452.000.000
Pengembangan Dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan	(1)Persentase puskesmas yang melaporkan data kesehatan secara lengkap dan tepat waktu ;	Kota Cimahi	(1)95 Persen;	425.000.000	APBD KOTA		(1)95 Persen;	425.000.000
Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	(1)Persentase tenaga kesehatan yang terlatih ;	Kota Cimahi	(1)100 Persen;	495.000.000 0	APBD KOTA		(1)100 Persen;	495.000.000
PROGRAM UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN PERORANGAN				8.311.000.000				8.311.000.000
	(1)Persentase Peningkatan Kategori Keluarga Sehat;		(1)7 Persen;				(1)7 Persen;	

Peningkatan Pelayanan Dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	(1)Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif ; (2)Cakupan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus; (3)Cakupan Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi;	Kota Cimahi	(1)100 Persen; (2)100 Persen; (3)100 Persen;	1.170.000.000	APBD KOTA		(1)100 Persen; (2)100 Persen; (3)100 Persen;	1.170.000.000
Peningkatan Pelayanan Imunisasi	(1)Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap;	Kota Cimahi	(1)93 Persen;	425.000.000	APBD KOTA		(1)93 Persen;	425.000.000
Peningkatan Promosi Obat Bahan Alami Asli Indonesia Di Dalam Dan Di Luar Negeri	(1)Jumlah RW percontohan baru yang mnedapatkan pembinaan dan memanfaatkan TOGA;	Kota Cimahi	(1)15 Unit;	28.000.000	APBD KOTA		(1)15 Unit;	28.000.000
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	(1)Cakupan Rumah Tangga ber-PHBS; (2)Cakupan strata RW Siaga Aktif purnama dan mandiri ;	Kota Cimahi	(1)70 Persen; (2)70 Persen;	980.000.000	APBD KOTA		(1)70 Persen; (2)70 Persen;	980.000.000
	(1)Persentase Peningkatan Kategori Keluarga Sehat; (2)Prevalensi Stunting Pada Baduta;		(1)7 Persen; (2)12.04 Angka;				(1)7 Persen; (2)12.04 Angka;	
Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah	(1)Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;	Kota Cimahi	(1)100 Persen;	450.000.000	APBD KOTA		(1)100 Persen;	450.000.000
Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak	(1)Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir; (2)Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin; (3)Cakupan pelayanan	Kota Cimahi	(1)100 Persen; (2)100 Persen; (3)100 Persen;	925.000.000	APBD KOTA		(1)100 Persen; (2)100 Persen; (3)100 Persen;	925.000.000

	kesehatan ibu hamil;							
Pelayanan Pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular	(1)Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan TB ;	Kota Cimahi	(1)100 Persen;	550.000.000	APBD KOTA		(1)100 Persen;	550.000.000
Pelayanan Sunatan Massal	(1)Jumlah anak dari keluarga miskin yang dikhitan;	Kota Cimahi	(1)75 Orang;	130.000.000	APBD KOTA		(1)75 Orang;	130.000.000
Penanggulangan Hiv Aids	(1)Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV ;	Kota Cimahi	(1)100 Persen;	500.000.000	APBD KOTA		(1)100 Persen;	500.000.000
Penanggulangan Masalah Gizi Masyarakat	(1)Persentase ibu hamil KEK; (2)Persentase rematri mendapat Tablet Tambah darah (TTD);	Kota Cimahi	(1)2.37 Persen; (2)35 Persen;	425.000.000	APBD KOTA		(1)2.37 Persen; (2)35 Persen;	425.000.000
Pencegahan Penularan Penyakit Endemik & Epidemik	(1)Angka Bebas Jentik (ABJ);	Kota Cimahi	(1)95 Persen;	320.000.000	APBD KOTA		(1)95 Persen;	320.000.000
Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat	(1)Persentase akses penduduk terhadap air minum berkualitas; (2)Persentase akses penduduk terhadap jamban sehat	Kota Cimahi	(1)85 Persen; (2)72 Persen;	390.000.000	APBD KOTA		(1)85 Persen; (2)72 Persen;	390.000.000
Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat	(1)Cakupan Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat;	Kota Cimahi	(1)100 Persen;	478.000.000	APBD KOTA		(1)100 Persen;	478.000.000
Peningkatan Kesehatan Lansia	(1)Persentase pengunjung berusia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;	Kota Cimahi	(1)100 Persen;	130.000.000	APBD KOTA		(1)100 Persen;	130.000.000

Peningkatan Kie Dampak Asap Rokok	(1)Cakupan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di fasilitas pelayanan kesehatan; (2)Cakupan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di perkantoran;	Kota Cimahi	(1)11 Persen; (2)11 Persen;	350.000.000	APBD KOTA		(1)11 Persen; (2)11 Persen;	350.000.000
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	(1)Cakupan asuhan keperawatan keluarga yang dilayani sesuai standar;	Kota Cimahi	(1)84 Persen; (2)85 Persen;	180.000.000	APBD KOTA		(1)84 Persen; (2)85 Persen;	180.000.000
	(2)Cakupan kunjungan masyarakat ke fasyankes ;							
Peningkatan Pemberdayaan Konsumen / Masyarakat Di Bidang Obat Dan Makanan	(1)Persentase peserta penyuluhan keamanan pangan yang lulus dan mendapatkan sertifikat; (2)Persentase sarana IRTP yang diaudit;	Kota Cimahi	(1)100 Persen; (2)100 Persen;	60.000.000	APBD KOTA		(1)100 Persen; (2)100 Persen;	60.000.000
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya	(1)Jumlah kantin /warung sekolah (PJAS) yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan; (2)Jumlah sarana pelayanan kefarmasian yang mendapat pembinaan dan pengawasan;	Kota Cimahi	(1)46 Unit; (2)46 Unit;	50.000.000	APBD KOTA		(1)46 Unit; (2)46 Unit;	50.000.000

Peningkatan Surveillance Epidemiologi Penanggulangan Wabah	(1)Penemuan Kasus AFP pada penduduk < 15 tahun;	Kota Cimahi	(1)>= 2/100000 Orang;	180.000.000	APBD KOTA		(1)>= 2/100000 Orang;	180.000.000
Penyelenggaraan Dan Pembinaan Kesehatan Kerja Dan Olah Raga	(1)Jumlah Pos UKK yang terbentuk ; (2)Persentase jemaah haji yang diperiksa kebugaranny	Kota Cimahi	(1)12 Unit; (2)88 Persen;	230.000.000	APBD KOTA		(1)12 Unit; (2)88 Persen;	230.000.000
Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat	(1)Persentase rumah sehat;	Kota Cimahi	(1)67 Persen;	360.000.000	APBD KOTA		(1)67 Persen;	360.000.000
Total				41.174.140.000				41.174.140.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Rencana kerja tahun 2021 merupakan periode keempat dari pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan 2017-2020. Dalam penyusunan rencana kerja yahun 2021 untuk program dan kegiatan tetap mengacu pada Renstra Dinas Kesehatan 2017-2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Jumlah anggaran belanja langsung yang tersedia sebesar Rp. 86.240.359.768,-, dengan sumber dari APBD sebesar Rp. 64.347.158.120,- (74,61%) dan Dana Kapitasi JKN sebesar 21.893.201.648,- (25,39%), sebagaimana digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 16 Pagu Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2021 berdasarkan Sumber Anggaran

NO	SUMBER ANGGARAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	%
1	APBD KOTA	64.347.158.120,-	74,61
2	KAPITASI JKN	21.893.201.648,-	25,39
	TOTAL	86.240.359.768,-	100

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2021 terdiri dari 5 program, 18 kegiatan dan 72 sub kegiatan. Setelah melalui beberapa proses tahapan sesuai Permendagri 86 tahun 2017, maka dinas kesehatan untuk tahun 2021 akan mengelola anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut. Uraian Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2021 Berikut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 17 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 sesuai RKPD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target		Sumber Dana
							Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			86.240.359.768	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP	85	42.367.123.780	APBN
1	2	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			50.501.800	
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen anggaran Jumlah Dokumen RenjaDinas Jumlah Dokumen Renja Perubahan Jumlah Dokumen Renstra Dinas Jumlah Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah	6 dokumen 1 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Kegiatan	26.001.900	
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP Jumlah Dokumen Laporan SPM Jumlah Dokumen LPPD dan LKPJ Jumlah Dokumen Monev Kinerja	1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 7 Dokumen	24.499.900	
1	2	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			37.389.882.000	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan	380 Orang	37.317.882.000	
1	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan	12 Dokumen	72.000.000	
1	2	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			299.905.000	
1	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah set pakaian kerja lapangan pegawai	100 set	24.905.000	

1	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang difasilitasi bimtek	20 Pegawai	275.000.000	
1	2	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			580.526.800	
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Listrik dan Penerangan	12 bulan	10.002.600	
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan pemeliharaan perlengkapan/ peralatan kantor Jumlah bulan Penyediaan ATK Jumlah set peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan 12 Bulan 15 Unit	85.807.700	
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah set peralatan rumah tangga	5 set	20.093.300	
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat	12 bulan	100.631.200	
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan cetakan dan penggandaan	12 Bulan	189.000.000	
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Fasilitasi, Koordinasi, dan Konsultasi	12 Bulan	174.992.000	
1	2	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			7.500.000	
1	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah set pemeliharaan mebeleur	2 set	7.500.000	
1	2	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.896.558.180	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Jasa Air Jumlah Bulan Jasa Komunikasi Jumlah Bulan Jasa Listrik	12 Bulan	1.010.123.580	
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan kebersihan kantor	13 Bulan	886.434.600	
1	2	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.142.250.000	

1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan pemberian BBM Jumlah unit kendaraan Jumlah Unit Kendaraan yang diservice	12 Bulan 27 Unit 3 Unit	1.036.500.000	
1	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Gedung Kantor	13 Bulan	1.105.750.000	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting PadaBaduta	12.04	21.010.217.240	APBD
1	2	2	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			2.445.108.270	
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	jumlah bulan penyewaan gedung / gudang jumlah ipal yang diperbaiki jumlah puskesmas yang melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan	6 bulan 2 unit 13 puskesmas	159.948.000	
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan alat kesehatan di pelayanan kesehatan Jumlah Puskesmas yang mendapatkan pemeliharaan alat kesehatan / penunjang medik	7 unit 3 Puskesmas	144.000.000	
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah jenis BMHP Jumlah jenis pengadaan obat Jumlah pengadaan Vaksin	60 Jenis 100 Jenis 1 Jenis	2.141.160.270	
1	2	2	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			18.274.662.100	

1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah kegiatan pelaksanaan pemeriksaan ibu hamil oleh tenaga SPOG Jumlah peserta Pertemuan sosialisasi program kesehatan ibu dan anak	11528 orang 5 kegiatan 300 orang	155.690.000	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Penguatan program EMAS	11004 Orang 12 Orang	504.000.000	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah peserta Pelatihan/penyeliaan fasilitatif di puskesmas PONED	10696 Orang 40 Orang	120.000.000	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Pertemuan reviu PERDA KIBBLA	51988 Orang 1 Laporan	12.099.500	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Penduduk Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Pembinaan Sekolah Sehat Pertemuan Program UKS	87223 Orang 12 Sekolah 34 Orang	213.900.000	
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Deteksi dini Faktor Risiko PTM bagi ASN Tingkat Kota Cimahi Deteksi IVA TEST Jasa Petugas Penunjang P2PTM KESWA Jumlah penduduk usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar Penguatan pandu PTM di FKTP Pertemuan Usia Produktif Sosialisasi hari Pendengaran Sedunia	1250 Orang 1500 Orang 286 Orang/hari 368206 Orang 82 Orang 144 Orang 6 Perusahaan	285.740.000	

1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar Peningkatan pelayanan kesehatan lanjut usia Pertemuan Program Lanjut usia	49506 Orang 30 Orang 70 Orang	133.050.000	
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi usia lebih dari sama dengan 15 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Pertemuan Program Hipertensi bagi petugas Fasyankes Sosialisasi dan Pelayanan Hipertensi Tingkat Kota Cimahi	175157 orang 118 orang 450 orang	110.550.000	
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita DM usia lebih dari sama dengan 15 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Pertemuan Program Diabetes Mellitus bagi petugas Fasyankes Sosialisasi dan Pelayanan DM Tingkat Kota Cimahi	9638 orang 144 orang 450 orang	110.550.000	
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah penanganan dan Pendampingan ODGJ Gaduh Gelisah Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Monitoring dan evaluasi Rakor TPKJM dan NAPZA Pelatihan Deteksi Dini Kesehatan Jiwa dan NAPZA Pendampingan pelayanan kesehatan jiwa dan FGD Penguatan Jejaring Lintas Sektor dan Lintas Program Pertemuan program jiwa bagi petugas puskesmas, klinik dan RS	288 kali 775 orang 1 kali 1 kali 26 kali 1 kali 2 kali	173.076.000	

1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Bimbingan teknis program TB ke RS dan Puskesmas Jumlah orang terduga TBC yang mendapat pelayanan TBC sesuai standar Konsultasi Program TB Monitoring dan evaluasi Program TB Sosialisasi Program TB	38 kali 11800 orang 4 Kali 6 Kali 10 Kali	334.315.800	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Bimbingan teknis program Jumlah kegiatan pengelolaan pelayanan program HIV Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Konsultasi Program Pertemuan Sosialisasi Program HIV	3 Kali 13 kegiatan 14197 Orang 4 Kali 10 Kali	287.684.800	
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penanganan dan Pengiriman Spesimen KLB jumlah peserta konsolidasi dan advokasi PSC Jumlah Peserta Pelatihan Penanganan KLB Pelaksanaan TGC Pelayanan P3K	160 Sampel 100 Orang 25 Orang 6 Orang 1 Paket	886.599.900	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Pertemuan Pelayanan Kesehatan Gizi Pengadaan PMT Lokal	70 Orang 198 Paket	574.815.400	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pelaksana Kegiatan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pelatihan Kader Pos UKK Pengukuran Kebugaraan Jemaah Haji Pertemuan Evaluasi dan Koordinasi Kesehatan Kerja dan Olahraga Pertemuan Koordinasi dan Persiapan Pengukuran Calon Jemaah Haji	286 hari/org 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali	83.879.200	

1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah inspeksi Sarana Air Bersih (SAB) pada industri/fasilitas pelayanan kesehatan Jumlah kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Jumlah limbah medis yang dikelola Jumlah pelatihan study EHRA	1 kali 12 kali 5484 kg/tahun 2 dokumen	221.020.000	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah jenis pengadaan Media Promosi Kesehatan Jumlah media promosi yang mendapatkan pemeliharaan Jumlah pengadaan pendukung PIK Jumlah Penyuluhan di luar Gedung Jumlah penyuluhan Mobile Promosi Kesehatan Jumlah peserta Pembinaan dan monev program	7 Jenis 6 Unit 4 Unit 48 Kali 22 Kali 35 Orang	215.531.300	
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pengelolaan administrasi program surveilans Jumlah Penemuan Kasus Non PD3I Jumlah pertemuan kegiatan Jemaah haji Jumlah sampel penyelidikan epidemiologi (PE) Pembuatan Aplikasi e_surveilans Pertemuan Evaluasi program surveilans Pertemuan Kegiatan SKDR penyakit potensial wabah PD3I	13 Kegiatan 12 Laporan 556 Orang 56 Sampel 1 Paket 200 Orang 50 Orang	149.999.900	
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah asuhan keperawatan keluarga yang dilayani sesuai standar Jumlah kunjungan laboratorium Jumlah Kunjungan rawat jalan gigi Jumlah pertemuan koordinasi PIS-PK Jumlah pertemuan Sistem Pelayanan Rujukan	4414 KK 55375 Orang 55375 Orang 4 Kali 2 Kali	69.694.000	

1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah konsultasi program penyakit menular dan zoonosis Jumlah pertemuan evaluasi program endemik epidemik dan zoonosis Jumlah Pertemuan sosialisasi program endemik epidemik dan zoonosis; Kegiatan pengendalian vektor Jumlah pertemuan evaluasi dan sosialisasi program (ISPA, Diare dan Hepatitis)	8 kali 3 Kali 3 Kali 80 kali 8 kali	472.962.200	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dari keluarga miskin yang dikhitan Jumlah ibu hamil atau bersalin yang mendapatkan pelayanan Jampersal Jumlah kegiatan verifikasi JKN Jumlah kegiatan verifikator dalam pengelolaan JKN Jumlah Pembayaran Non Kapitasi Jumlah Pembayaran PBI 60% Jumlah Pertemuan JKN Pembayaran Jamkesda Penyusunan Kerjasama dengan RS di luar PBI	75 orang 11052 Orang 12 Bulan 13 bulan 12 bulan 58035 orang 4 Kali 12 bulan 2 Kali	13.000.610.000	
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah deklarasi ODF Jumlah pembinaan kota sehat tingkat provinsi Jumlah pembinaan kota sehat tk. kota Jumlah pertemuan koordinasi tim pembina kota sehat Jumlah rapat koordinasi pra ODF Jumlah verifikasi tingkat nasional Pembinaan lingkungan bersih dan sehat	9 kelurahan 2 kali 1 kali 12 kali 2 kali 3 kali 1 kali	70.859.200	
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah klinik yang melaksanakan penilaian akreditasi Jumlah Pertemuan Sosialisasi Persiapan Penilaian Akreditasi	2 unit 1 kali	29.994.900	

1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah anak SD yang mendapat Imunisasi Jumlah Audit KIPI Jumlah peserta pertemuan Audit KIPI Jumlah peserta Pertemuan kegiatan BIAS dan IDL Pengambilan Vaksin Rutin, BIAS, Haji dan Logistik	30000 Orang 10 Kasus 120 Orang 516 Orang 18 Kali	58.040.000	
1	2	2	2,03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi			223.962.970	
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen informasi kesehatan	6 Dokumen	19.579.000	
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah pemeliharaan sistem dan jaringan LAN pembuatan aplikasi SIMPUS	13 Kegiatan 1 Paket	129.319.200	
1	02	02	2.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah perangkat Sistem Informasi Kesehatan	23 unit	75.064.770	
1	2	2	2,04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			66.483.900	
1	02	02	2.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pertemuan Pembinaan RS dan Faskes;	2 kali	16.495.000	
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen Penilaian Kinerja Puskesmas Jumlah laporan kegiatan SURVEY Kepuasan Masyarakat Jumlah pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	1 dokumen 1 laporan 2 kali	49.988.900	
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas Terakreditasi Minimal Dengan Strata Madya	92,31	433.395.100	APBD

1	2	3	2,01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota			15.995.000	
1	02	03	2.01	01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Pertemuan Pengendalian dan Pengawasan penilaian Ijin Praktek Nakes dengan Organisasi Profesi dan DPMTSP	2 kali	15.995.000	
1	2	3	2,02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			417.400.100	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	jumlah pelaksanaan uji kompetensi Jumlah Pertemuan Internsip Dokter Jumlah Pertemuan Rencana Pemenuhan Kebutuhan tenaga kesehatan Jumlah Tenaga Kesahatan Yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	2 kali 8 kali 4 kali 4 kali	287.575.800	
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah pembinaan jabatan fungsional Jumlah pembinaan tenaga kesehatan teladan Jumlah Pertemuan pembinaan SDMK per profesi Jumlah Pertemuan Penyusunan informasi tenaga kesehatan	4 kali 3 kali 9 kali 2 kali	129.824.300	
1	2	4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Prevalensi Stunting Pada Baduta	12.04	202.019.900	
1	2	4	2,01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			26.998.100	

1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah pengawasan dan pembinaan terhadap sarana kantin / warung sekolah Jumlah sarana IRTP yang diaudit Jumlah pertemuan pembinaan dan pengawasan sarana kesehatan Jumlah realisasi pemanfaatan anggaran BOK kefarmasian Jumlah sarana kesehatan yang mendapat bimbingan dan pengawasan	10 kali 10 kali Rp. 20000000 40 sarana	25.000.000	
1	02	04	2.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Laporan data sarana kesehatan yang dikelola	1 laporan	1.998.100	
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			157.000.000	
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah pertemuan PKP yang dilaksanakan Jumlah sampel yang dilakukan pemeriksaan post market Jumlah sarana IRTP yang diaudit	2 Kali 50 sampel 100 Sarana	157.000.000	
1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			18.021.800	

1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Jasa Boga atau Rumah makan yang telah memiliki sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jumlah peserta orientasi Higiene Sanitasi jasa boga atau rumah makan	5 Unit 20 Orang	18.021.800	
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kepuasan Pelanggan	75	334.402.100	APBD
1	2	5	2,01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			108.600.000	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pembinaan dan Pengembangan SBH Pembinaan/Penguatan Kemitraan GERMAS Tingkat Kota Pengiriman Kontingen SBH Pertemuan Advokasi dan Penyusunan Perwal KTR Seminar Implementasi KTR di Sekolah	30 Orang 2 kali 15 Orang 1 Dokumen 50 Sekolah	108.600.000	
1	2	5	2,02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			193.901.300	
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Pokja Kelurahan Siaga yang dibina Monitoring dan evaluasi pendataan PHBS rumah tangga Pembinaan RW Siaga dan evaluasi implementasi inovasi Germas Promosi kesehatan dan Penggerakan masyarakat dalam Hari Tanpa Tembakau	15 unit 60 Orang 15 Kelurahan 526 Orang	193.901.300	
1	2	5	2,03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			31.900.800	

1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Pembinaan UKBM Percontohan Pertemuan Penyusunan Laporan Bagi Kader	15 Kelurahan 150 Orang	31.900.800	
					BLUD PUSKESMAS				
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			21.893.201.648	JKN
1	2	2	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.029.174.500	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Padasuka	25836 orang	2.029.174.500	
1	2	2	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.874.077.000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Melong Asih	20608 orang	1.874.077.000	
1	2	2	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.036.364.500	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah peserta JKN di wilayah kerja puskesmas Melong Tengah	12286 orang	1.036.364.500	
1	2	2	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.714.924.000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah peserta JKN di wilayah puskesmas cigugur tengah	21784 orang	1.714.924.000	
1	2	2	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.856.114.000	

1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah peserta JKN di wilayah puskesmas cimahi selatan	21503 orang	1.856.114.000	
1	2	2	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.949.459.500	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah peserta JKN di wilayah kerja puskesmas Cipageran	23964 orang	1.949.459.500	
1	2	2	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.006.923.300	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah peserta JKN di wilayah kerja puskesmas Cimahi Tengah	24961 orang	2.006.923.300	
1	2	2	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.388.284.000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah peserta JKN di wilayah Puskesmas Citeureup	18486 orang	1.388.284.000	
1	2	2	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.703.335.348	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Cimahi Utara	29362 orang	2.703.335.348	
1	2	2	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			719.287.000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Pasirkaliki	9450 orang	719.287.000	
1	2	2	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.216.226.000	

1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Cibeureum	28063 orang	2.216.226.000	
1	2	2	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.045.759.000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah peserta JKN di wilayah kerja puskesmas Cibeber	13269 orang	1.045.759.000	
1	2	2	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.353.273.500	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		16230 orang	1.353.273.500	

BAB V

PENUTUP

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2021 ini disusun sebagai gambaran atau pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan di Dinas Kesehatan tahun 2019 dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019 merupakan hasil tahun kedua dari pelaksanaan dokumen perencanaan jangka menengah Renstra Dinas Kesehatan periode 2017-2022 yang menunjukkan pencapaian kinerja Dinas Kesehatan seperti yang telah ditetapkan dalam Renstra. Dalam perjalanannya pelaksanaan Renja tahun 2019 banyak mengalami perubahan, terkait perubahan indikator dan target pada program dan kegiatan di tahun 2019, besarnya anggaran yang harus menyesuaikan dengan dokumen Renstra, RKPD dan RPJMD Kota Cimahi. Selanjutnya hasil evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada renja tahun 2019 akan menjadi bahan evaluasi terhadap Renstra dan RPJMD yang sekiranya akan mengalami perubahan kembali.

Dalam penyusunan rencana kerja tahun 2021 yang merupakan pedoman untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan tetap mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan 2017-2022 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi 2017-2022, Renstra Dinas Kesehatan Jawa Barat 2018-2023, Renstra Kementerian Kesehatan RI Tahun 2019-2024 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan memperhitungkan kesesuaian kebutuhan dan kekuatan yang dimiliki, sebagai upaya untuk dapat mencapai kinerja yang telah ditetapkan.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2021, sebagai upaya mendukung visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis, baik dalam lingkup

Pemerintah Kota Cimahi maupun di lingkup Dinas Kesehatan pada khususnya.

Komitmen dan dukungan dari seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Cimahi sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang telah disusun di dalam Rencana Kerja tahun 2021 ini. Kemudian Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2021 ini dapat dijadikan pedoman/acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan peningkatan derajat kesehatan di Kota Cimahi.



RENCANA KERJA TAHUN 2021



GERMAS
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat